




DAFTAR ISI	
KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN	2
1.3 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI TUGAS.....	2
1.3.1 Penataan Organisasi Deputi Bidang Pengembangan Pemuda.....	3
1.3.1.1 Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	4
1.3.1.2 Asisten Deputi Kepemimpinan Pemuda.....	4
1.3.1.3 Asisten Deputi Kepeloporan Pemuda.....	4
1.3.1.4 Asisten Deputi Kewirausahaan Pemuda	5
1.3.1.5 Asisten Deputi Kemitraan Pemuda	6
1.3.2 Sumber Daya Manusia.....	6
1.4 POTENSI DAN PERMASALAHAN STRATEGIS.....	10
1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN	10
BAB II	
PERENCANAAN KINERJA.....	12
2.1 RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA 2024 «	12
2.2 RENCANA KERJA	15
2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA	16
2.4 PERJANJIAN KINERJA	16
2.5 POSTUR ANGGARAN	18
BAB III	
EVALUASI CAPAIAN KINERJA.....	20
3.1 PENGUKURAN KINERJA DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA 2024 «	20
3.2 CAPAIAN KINERJA	20
3.3 ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA	53
3.4 DUKUNGAN TERHADAP PRIORITAS NASIONAL	54
3.5 REALISASI ANGGARAN	63

BAB IV

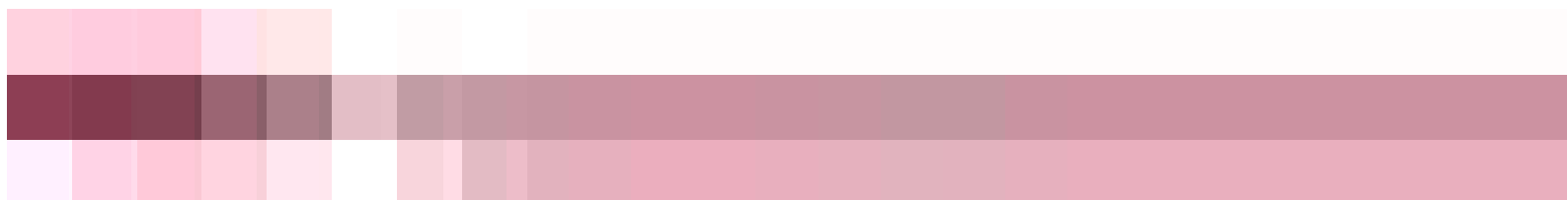
PENUTUP65

LAMPIRAN66

Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai pada Deputy Bidang Pengembangan Pemuda Tahun 2024	7
Tabel 1. 2 Rekapitulasi Jabatan Deputy Bidang Pengembangan Pemuda.....	7
Tabel 2. 1 Sasaran Program Deputy Bidang Pengembangan Pemuda Tahun 2024 « « « « « 15	15
Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama Deputy Bidang Pengembangan Pemuda 2024	16
Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Pengembangan Pemuda 2024.....	18
Tabel 2. 4 Postur Anggaran Deputy Bidang Pengembangan Pemuda 2024.....	19
Tabel 3. 1 Ringkasan Kinerja Deputy Bidang Pengembangan Pemuda Tahun 2024 « «	22
Tabel 3. 2 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 1.....	26
Tabel 3. 3 Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Program Persentase pemuda yang bekerja dengan status berusaha sendiri dan dibantu buruh (tetap dan tidak tetap)	27
Tabel 3. 4 Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Program Persentase Pemuda yang bekerja dengan status berusaha sendiri dan dibantu buruh (tetap dan tidak tetap) Periode tahun 2020 -2024	28
Tabel 3. 5 Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Program Persentase Pemuda yang mengikuti kegiatan organisasi Periode tahun 2020 -2024.....	30
Tabel 3. 6 Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Program Pelaksanaan Koordinasi Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan Periode tahun 2020 -2024	31
Tabel 3. 7 Tabel Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Program Persentase ketercapaian indikator Rencana Aksi Nasional Pelayanan Kepemudaan Periode tahun 2020 -2024.....	33
Tabel 3. 8 Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Program Tingkat Kualitas Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda Periode tahun 2020 -2024	34
Tabel 3. 9 Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Program Persentase NEET Periode tahun 2020 -2024	37
Tabel 3. 10 Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Program Persentase Usia Muda (15-24 Tahun) yang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan	39
Tabel 3. 11 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 2.....	41
Tabel 3. 12 Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Program Nilai Evaluasi SAKIP Internal Periode tahun 2020 -2024	43
Tabel 3. 13 Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Program Nilai IKPA Periode tahun 2020 -2024	46
Tabel 3. 14 Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Program Nilai Kinerja Anggaran Periode tahun 2020 -2024.....	48
Tabel 3. 15 Persentase temuan LHP BPK yang ditindaklanjuti Pada Deputy Bidang Pengembangan Pemuda	49
Tabel 3. 16 Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Program Persentase temuan LHP BPK yang ditindaklanjuti Pada Deputy Bidang Pengembangan Pemuda Periode tahun 2020 -2024	50
Tabel 3. 17 Rentang Nilai SKM.....	51
Tabel 3. 18 Hasil Survei Kepuasan Masyarakat.....	52
Tabel 3. 19 Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Program Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat Periode tahun 2020 -2024	53
Tabel 3. 20 Perhitungan Realisasi Anggaran Periode tahun 2020 -2024.....	64



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Deputy Bidang Pengembangan Pemuda	3
Gambar 1. 2 Komposisi Pegawai Deputy Bidang Pengembangan Pemuda	7
Gambar 2. 1 Postur Anggaran Deputy Bidang Pengembangan Pemuda 2024 « « « « « «19
Gambar 3. 1 Kriteria Penilaian Ketercapaian Target Indikator « « « « « « « « « «	20
Gambar 3. 2 Tingkat Kualitas Pelaksanaan Koordinasi Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan	31
Gambar 3. 3 Capaian Indikator RAN Pelayanan Kepemudaan 2024.....	33
Gambar 3. 4 Data NEET 2024.....	38
Gambar 3. 5 Nilai Evaluasi SAKIP Internal	43
Gambar 3. 6 IKPA Deputy Bidang Pengembangan Pemuda 2024.....	45
Gambar 3. 7 Capaian SMART Deputy Bidang Pengembangan Pemuda Tahun 2024	48
Gambar 3. 8 Perbandingan Capaian Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Deputy Bidang Pengembangan Pemuda 2024.....	52
Gambar 3. 9 Realisasi Anggaran Unit Eselon II pada Deputy Bidang Pengembangan Pemuda	64





RINGKASAN EKSEKUTIF

LAPORAN KINERJA Deputy Bidang Pengembangan Pemuda tahun 2024 merupakan gambaran tentang capaian kinerja *outcome* (dampak) yang sesungguhnya dalam penyelenggaraan koordinasi, pembinaan dan dukungan administrasi terkait pelayanan di bidang kepemudaan.

Pencapaian Kinerja Deputy Bidang Pengembangan Pemuda tahun 2024 mengacu pada Sasaran Program yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Pengembangan Pemuda tahun 2024. Pencapaian tersebut dilakukan melalui Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di lingkungan Deputy Bidang Pengembangan Pemuda. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Deputy Bidang Pengembangan Pemuda tahun 2024 ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut

Ringkasan Kinerja Deputy Bidang Pengembangan Pemuda Tahun 2024

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Capaian	%	Kategori Capaian
1	Tercapainya pemuda yang berkarakter, berbudaya, mandiri, berdaya saing, semangat berwirausaha dan berwawasan luas serta berperan aktif dalam sosial kemasyarakatan, kepemimpinan, kepeloporan dalam kegiatan politik	Persentase pemuda (16-30 tahun) yang bekerja dengan status berusaha sendiri dan dibantu buruh (tetap dan tidak tetap) dalam jenis jabatan <i>white collar</i>	0,55%	0,47%	85,45	Cukup
		Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti kegiatan organisasi dalam 3 bulan terakhir	Meningkat (7,84%)	5,44%	69,39	Kurang
		Tingkat Kualitas Pelaksanaan Koordinasi Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan	84	91,18	108,55	Sangat Baik

		Persentase ketercapaian indikator Rencana Aksi Nasional Pelayanan Kepemudaan	80%	30,30	37,88	Kurang
		Tingkat Kualitas Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda	80	100	125	Sangat Baik
		Persentase Usia Muda (15-24 Tahun) yang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan	22,08 %	23,78%	92,85	Baik
2	Terwujudnya Deputi Bidang Pengembangan Pemuda yang berkinerja, bersih, akuntabel, profesional dan melayani.	Nilai Penilaian Mandiri Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (PM SAKIP) Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	78	75,67	97,01	Baik
		Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	88	77,52%	88,09 %	Cukup
		Nilai Kinerja Anggaran pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	91	76,26%	83,80 %	Cukup
		Persentase temuan LHP BPK yang ditindaklanjuti pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	75%	80%	106,67	Sangat Baik

	Indeks kepuasan masyarakat pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	92	90.57	98,45	Baik
--	---	----	-------	-------	------

Tabel 1 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Sasaran Program Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Tahun 2024

Terdapat total sebanyak 2 Sasaran Program pada tahun 2024 dengan 11 indikator kinerja sasaran program. Capaian kinerja Deputi Bidang Pengembangan Pemuda tahun 2024 secara keseluruhan dapat sebesar 89,83%. Dari 11 indikator yang dilakukan pengukuran, sejumlah 3 (tiga) indikator sangat baik ($x < 100$) dan 3 (tiga) indikator sangat baik ($x < 100$). Dengan total pagu Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Tahun 2024 sebesar Rp80.247.038.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp73.328.317.386 atau memiliki daya serap sebesar 91,38%

Daya Serap Sebelum Penghematan Belanja Perjalanan Dinas



Ada pun apabila menggunakan Pagu Anggaran pasca penghematan maka daya serap Deputi Bidang Pengembangan Pemuda menjadi 98,02% dari pagu Rp74.202.038.000.

Berdasarkan grafik 1, daya serap Deputy Bidang Pengembangan Pemuda mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, tetapi capaian kinerja mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa kebijakan yakni revisi terkait kenaikan tunjangan dan revisi terkait penghematan Belanja Perjalanan Dinas, secara tidak langsung adanya pemotongan dan penghematan dapat mempengaruhi rangkaian kegiatan

Sepanjang tahun 2024, Deputy Bidang Pengembangan Pemuda mendapat beberapa prestasi dan penghargaan yang menggambarkan kinerja di berbagai bidang tugas dan fungsi pada program dukungan manajemen, diantaranya :

1. STATUS WTP PADA OPINI BPK

Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora RI) kembali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Kemenpora tahun anggaran 2022. Dengan demikian, Kemenpora lima tahun secara berturut-turut meraih WTP antara lain tahun anggaran 2019, 2020, 2021, 2022, dan 2023.

2. KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN KATEGORI MENUJU INFORMATIF

Sesuai dengan hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan Informasi publik pada Badan Publik Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, Deputy Bidang Pengembangan Pemuda meraih predikat menuju informatif dengan nilai 99,41. Hal ini lebih baik dibandingkan dengan capaian sebelumnya.

3. PELAYANAN PUBLIK DENGAN KATEGORI BAIK

Deputy Bidang Pengembangan Pemuda mendapatkan predikat Sangat Baik dengan nilai 90,57 pada Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Reformasi birokrasi diartikan sebagai upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah. Reformasi birokrasi dilakukan guna mewujudkan negara dan pemerintahan yang memenuhi karakteristik *good governance*. Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* menurut UU Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas akuntabilitas yaitu bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu bentuk akuntabilitas tersebut berupa Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Deputy Bidang Pengembangan Pemuda Tahun 2024 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun 2024 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Deputy Bidang Pengembangan Pemuda. Laporan Kinerja ini juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja seluruh unit organisasi dan untuk mendapatkan masukan dari stakeholders untuk perbaikan kinerja Deputy Bidang Pengembangan Pemuda.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Deputy Bidang Pengembangan Pemuda Tahun 2024 berpedoman pada regulasi yang mengatur terkait dengan Laporan Kinerja diantaranya sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
4. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 68 tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Eselon I dan II di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja Deputy Bidang Pengembangan Pemuda Tahun 2023 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran pada Deputy Bidang Pengembangan Pemuda. Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Deputy Bidang Pengembangan Pemuda Tahun 2023 adalah untuk memberikan capaian kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Deputy Bidang Pengembangan Pemuda untuk meningkatkan kinerjanya.

1.3 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI TUGAS

Menurut Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga. Deputy Bidang Pengembangan Pemuda yang selanjutnya disebut Deputy II berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pemuda dan Olahraga.

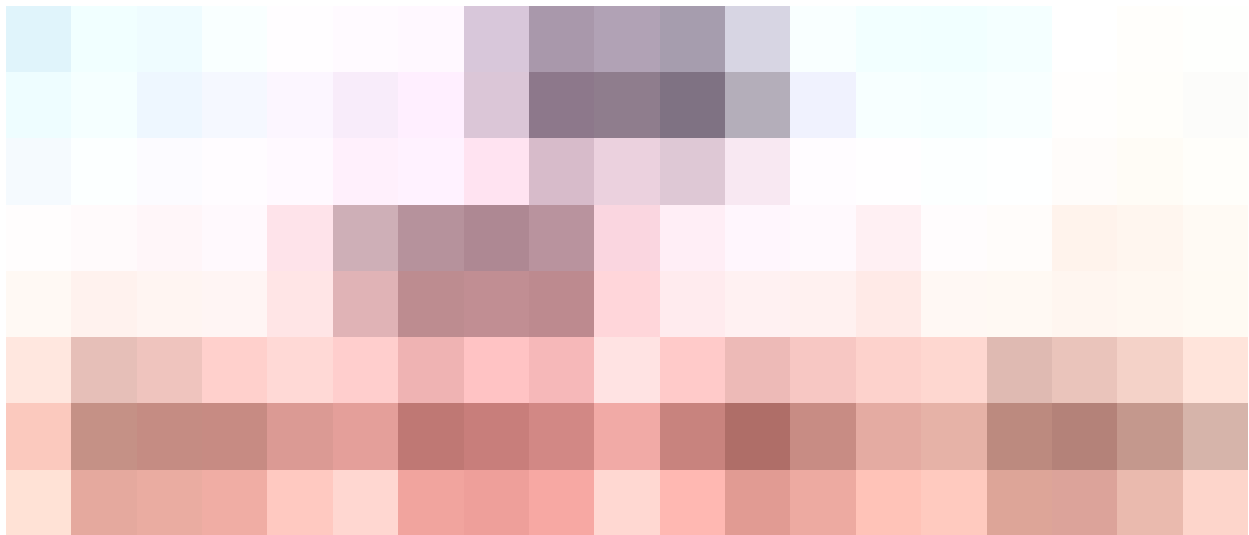
Deputy Bidang Pengembangan Pemuda mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pengembangan Pemuda.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Deputy Bidang Pengembangan Pemuda menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang pengembangan pemuda;
2. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pemuda;
3. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan pemuda;
4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan pemuda;
5. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan pemuda;
6. pelaksanaan administrasi Deputy Bidang Pengembangan Pemuda; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

1.3.1 Penataan Organisasi Deputy Bidang Pengembangan Pemuda

Dalam upaya penajaman dan penguatan tugas dan fungsi Deputy Bidang Pengembangan Pemuda memiliki lima unit Eselon II yang terdiri atas Sekretariat Deputy Bidang Pengembangan Pemuda, Asisten Deputy Kepemimpinan Pemuda, Asisten Deputy Kepeloporan Pemuda, Asisten Deputy Kewirausahaan Pemuda, dan Asisten Deputy Kemitraan Pemuda.



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Deputy Bidang Pengembangan Pemuda

Struktur Organisasi Deputy Bidang Pengembangan Pemuda yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 merupakan penjabaran tentang bagaimana visi dan misi Deputy Bidang Pengembangan Pemuda dapat dicapai secara efektif dan efisien sehingga dapat mengoptimalkan pencapaian kinerja.

Menurut Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga, di lingkungan Deputy Bidang Pengembangan Pemuda memiliki 5 (lima) Eselon II. Adapun Tugas dan Fungsi masing-masing Eselon II di lingkungan Deputy Bidang Pengembangan Pemuda adalah sebagai berikut:

1.3.1.1 Sekretariat Deputy Bidang Pengembangan Pemuda

Sekretariat Deputy Bidang Pengembangan Pemuda yang selanjutnya disebut Sekretariat Deputy II, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi, pengelolaan urusan keuangan, penatausahaan barang milik/kekayaan negara, serta pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Deputy Bidang Pengembangan Pemuda.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat Deputy II menyelenggarakan fungsi:

1. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran, rencana strategis, rencana kerja Deputy;
2. koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern Deputy;
3. penatausahaan barang milik/kekayaan negara Deputy;
4. pengelolaan keuangan Deputy;
5. pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, persuratan dan arsip, hukum, hubungan masyarakat, sistem informasi, kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan Deputy;
6. penyusunan laporan Deputy; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputy.

1.3.1.2 Asisten Deputy Kepemimpinan Pemuda

Asisten Deputy Kepemimpinan Pemuda mempunyai tugas melaksanakan perumusan, koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan di bidang pengembangan kepemimpinan pemuda. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Asisten Deputy Kepemimpinan Pemuda menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;
2. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kepemimpinan pemuda;
3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan kepemimpinan pemuda;
4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kepemimpinan pemuda; dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kepemimpinan pemuda.

1.3.1.3 Asisten Deputy Kepeloporan Pemuda

Asisten Deputi Kepeloporan Pemuda mempunyai tugas melaksanakan perumusan, koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan di bidang pengembangan kepeloporan pemuda. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Asisten Deputi Kepeloporan Pemuda menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang Pengembangan Kepeloporan Pemuda;
2. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kepeloporan pemuda;
3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan kepeloporan pemuda;
4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kepeloporan pemuda; dan
5. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kepeloporan pemuda

1.3.1.4 Asisten Deputi Kewirausahaan Pemuda

Asisten Deputi Kewirausahaan Pemuda mempunyai tugas melaksanakan perumusan, koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan di bidang pengembangan kewirausahaan pemuda. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Asisten Deputi Kewirausahaan Pemuda menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang Pengembangan kewirausahaan pemuda;
2. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kewirausahaan pemuda;
3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan kewirausahaan pemuda;
4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kewirausahaan pemuda;
5. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kewirausahaan pemuda.

1.3.1.5 Asisten Deputi Kemitraan Pemuda

Asisten Deputi Kemitraan Pemuda mempunyai tugas melaksanakan perumusan, koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan di bidang pengembangan kemitraan pemuda.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Asisten Deputi Kemitraan Pemuda menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang Pengembangan Kemitraan Pemuda;
2. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kemitraan pemuda;
3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan kemitraan pemuda;
4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kemitraan pemuda;
5. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kemitraan pemuda.

1.3.2 SUMBER DAYA MANUSIA

Deputi Bidang Pengembangan Pemuda dipimpin oleh Deputi Bidang Pengembangan Pemuda dalam pelaksanaan pekerjaan untuk mendukung operasional organisasi, Deputi Bidang Pengembangan Pemuda memiliki jumlah pegawai sebanyak 289 pegawai yang mencakup 271 pegawai ASN dan 197 pegawai Non ASN yang terdiri dari 282 Laki-Laki dan 186 Perempuan. Dengan rincian pada masing-masing unit kerja eselon II sebagai berikut:

Unit Kerja	ASN	NON ASN	Jumlah Pegawai
Deputi	1	0	2
Sesdep	31	6	37
Asdep Kepemimpinan	13	2	15
Asdep Kepeloporan	16	4	20
Asdedp Kewirausahaan	20	3	23
Asdep Kemitraan	13	3	16

<i>Outsourcing</i>	10		10
Total	104	18	122

Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai pada Deputy Bidang Pengembangan Pemuda Tahun 2024

Komposisi pegawai tersebut dapat digambarkan berdasarkan jenis kelamin seperti pada grafik sebagai berikut:



Gambar 1. 2 Komposisi Pegawai Deputy Bidang Pengembangan Pemuda

Ada pun berdasarkan klaster jabatan, maka pegawai di Deputy Bidang Pengembangan Pemuda dapat dijelaskan sebagai berikut:

Jabatan	Orang
Pejabat Tinggi Madya	1
Analisis Kebijakan Ahli Utama	1
Pejabat Tinggi Pratama	5
ASN Jafung	49
ASN Pelaksana	19
P3K	18
Honor Lembaga	8
Honor Lokal	11
Staf Asisten (OB Satpam)/ Outsourcing	10
Total	122

Tabel 1. 2 Rekapitulasi Jabatan Deputy Bidang Pengembangan Pemuda

Sesdep**PERENCANA**

NO	NAMA	JABATAN FUNGSIONAL
1	Drs. Arman, S.Pd.,M.Si	Perencana Ahli Madya
2	Kumalah, S.Sos., M.M.	Perencana Ahli Madya
3	Rina Yulistiarini, S.T., M.PD	Perencana Ahli Muda

ANALIS KEBIJAKAN

NO	NAMA	JABATAN FUNGSIONAL
1	Imam Gunawan	Analisis Kebijakan Ahli Utama

Asdep Kepemimpinan**PERENCANA**

N O	NAMA	JABATAN FUNGSIONAL
1	H. Abdullah Mas'ud, S.Pd.I.	Perencana Ahli Madya
2	Diah Agustina Anggraini, S.H.	Perencana Ahli Muda
3	Oktavia Suzana, S.Km.	Perencana Ahli Pertama

ANALIS KEBIJAKAN

N O	NAMA	JABATAN FUNGSIONAL
1	Dr. Jaswadi, S.Ag, M.SI	Analisis Kebijakan Ahli Madya
2	Een Ermawati	Analisis Kebijakan Ahli Madya
3	Ahmad Musawir, S.Si, M.Si	Analisis Kebijakan Ahli Muda
4	Muhammad Fauzi, S.Ap	Analisis Kebijakan Ahli Muda
5	Bambang Cahyono HS, SE	Analisis Kebijakan Ahli Pertama
6	Irma Rosalina, S.E	Analisis Kebijakan Ahli Pertama
7	Kurnia, S.E	Analisis Kebijakan Ahli Pertama
8	Emilda Hanna Febrianty, SE	Analisis Kebijakan Ahli Pertama

Asdep Kepeloporan**PERENCANA**

N O	NAMA	JABATAN FUNGSIONAL
1	Acep Duryatna, S.Pd	Perencana Ahli Madya
2	Foremil Deila Pandu Silalahi, S.T., M.M	Perencana Ahli Muda
3	Budiarto, S.E	Perencana Ahli Muda

ANALIS KEBIJAKAN

N O	NAMA	JABATAN FUNGSIONAL
1	Firtian Judiswandarta, S.E., S.T., M.M.	Analisis Kebijakan Ahli Madya
2	Dra. Sopti Popiyati, M.Pd	Analisis Kebijakan Ahli Madya
3	Budiyanto, S.Pd, M.Si	Analisis Kebijakan Ahli Madya
4	Rachmi Mulyasari, S.E.	Analisis Kebijakan Ahli Muda
5	Fatti Amalia Mendrofa, S.E., M.M.	Analisis Kebijakan Ahli Muda
6	Winarti, S.E.	Analisis Kebijakan Ahli Muda
7	Lediawati, S.E., M.M.	Analisis Kebijakan Ahli Muda
8	Tiara Erlita, S.E.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama
9	Gozi Rachmadi, S.E.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama
10	Erfan Gilang Nugraha, S.Pd	Analisis Kebijakan Ahli Pertama

Asdep Kewirausahaan**PERENCANA**

N O	NAMA	JABATAN FUNGSIONAL
1	Angrelia Dwi Pramestisari, S.E.	Perencana Ahli Madya
2	M. Dwi Rizkianoor, S.Sos	Perencana Ahli Muda

ANALIS KEBIJAKAN

N O	NAMA	JABATAN FUNGSIONAL
1	Riza Arief Bijaksana, S.Psi	Analisis Kebijakan Ahli Muda
2	Umriansyah, S.E., M.M.	Analisis Kebijakan Ahli Muda
3	Henny Delisda Nasution	Analisis Kebijakan Ahli Muda
4	Rahma Novita, S.I.Kom, M.Si	Analisis Kebijakan Ahli Muda
5	Ratih Usmawati	Analisis Kebijakan Ahli Muda
6	Budi Eko Wibowo, AKS	Analisis Kebijakan Ahli Muda
7	Riswan, S.E., M.M.	Analisis Kebijakan Ahli Muda
8	Lailiah	Analisis Kebijakan Ahli Muda
9	Robbi Setiadi	Analisis Kebijakan Ahli Pertama
10	Emmy Rosmalasari	Analisis Kebijakan Ahli Pertama
11	Rahmat Basuki	Analisis Kebijakan Ahli Pertama
12	Abdul Rosyad, S.E.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama
13	Muhammad Jafar Ashiddiq, S.E.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama
14	Nurpanani	Analisis Kebijakan Ahli Pertama

Asdep Kemitraan**PERENCANA**

N O	NAMA	JABATAN FUNGSIONAL
1	Sri Rahayu Budi Astuti, S.E.	Perencana Ahli Muda
2	Ridwan Abdiwibowo, S.Ag.	Perencana Ahli Muda

ANALIS KEBIJAKAN

N O	NAMA	JABATAN FUNGSIONAL
1	Jaya Sutrisno, S.Pd., M.M.	Analisis Kebijakan Ahli Madya
2	Riana Octaria Fasha, S.Pd., M.Pd.	Analisis Kebijakan Ahli Muda
3	M. Ihsan B. Tjenreng, S.Kom., M.Si.	Analisis Kebijakan Ahli Muda
4	Annisa Heru Putranti, S.IP	Analisis Kebijakan Ahli Muda
5	Aghna Swastika Fitri, S.Kom	Analisis Kebijakan Ahli Muda

1.4 POTENSI DAN PERMASALAHAN STRATEGIS

Sebagaimana diketahui bahwa potensi strategis Deputy Bidang Pengembangan Pemuda membantu tugas Menteri Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan perumusan, koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan di bidang pengembangan pemuda. Pada Tahun 2024 terdapat beberapa potensi yang diidentifikasi dapat menjadi penguat tugas dan fungsi Deputy Bidang Pengembangan Pemuda diantaranya :

1. Pengembangan kepemimpinan pemuda seperti dengan kegiatan PKPRT dan PKPMN;
2. Pengembangan kepeloporan pemuda misalnya dengan pemuda pelopor dan pemuda relawan siaga bencana;
3. Pengembangan kewirausahaan pemuda antara lain melalui kuliah kewirausahaan pemuda;
4. Pengembangan kemitraan pemuda baik di dalam negeri (PPAP) maupun di luar negeri (PPAN);
5. Koordinasi lintas sektor pelayanan kepemudaan dalam rangka pelaksanaan RAN pelayanan kepemudaan serta mendukung terbitnya RAD pelayanan kepemudaan;
6. Penyusunan dan sosialisasi laporan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)


Permasalahan strategis di Deputy Bidang Pengembangan Pemuda di Tahun 2024 antara lain:

1. Penyesuaian dokumen proses bisnis dan standar operasional prosedur;
2. (SOP) dengan kondisi terkini belum dilaksanakan dengan optimal;
3. Kebutuhan SDM Deputy Bidang Pengembangan Pemuda masih belum tercukupi serta peningkatan kompetensi SDM dalam rangka peningkatan kapasitas dan kapabilitas belum maksimal;
4. Koordinasi lintas Kementerian/Lembaga yang belum optimal.

1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya, Laporan Kinerja Deputy Bidang Pengembangan Pemuda Tahun 2024 ini adalah untuk menjelaskan pencapaian kinerja Deputy Bidang Pengembangan Pemuda selama tahun 2024. Capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan rencana kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja Deputy Bidang Pengembangan Pemuda Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- 
1. Pendahuluan, pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi;
 2. Perencanaan Kinerja, pada bab ini dibagi per subbab yang berisi perencanaan strategis Deputi Bidang Pengembangan Pemuda tahun 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja tahun 2024;
 3. Akuntabilitas Kinerja, pada bab ini dibagi per subbab yang berisi hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi capaian kinerja, serta akuntabilitas keuangan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda tahun 2024;
 4. Penutup, pada bab ini disajikan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Deputi Bidang Pengembangan Pemuda dan rekomendasi perbaikan ke depan untuk meningkatkan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA 2024

Sesuai amanah RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Sasaran tersebut dicerminkan melalui Tema Pembangunan Nasional, yaitu Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan. Sejalan dengan sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 tersebut, telah merumuskan visi misi Deputi Bidang Pengembangan Pemuda dalam suatu Rencana Strategis Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Tahun 2020-2024.

2.1.1 Rencana Strategis Deputi Bidang Pengembangan Pemuda

A. Visi Deputi Bidang Pengembangan Pemuda

Terwujudnya Pemuda yang Berkualitas dan berdaya Saing melalui Pengembangan Pemuda untuk terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong.

B. Misi Deputi Bidang Pengembangan Pemuda

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pengembangan pemuda dalam rangka mewujudkan pemuda berkualitas,
2. Mengkoordinasikan dan mensinkronkan pelaksanaan kebijakan pengembangan pemuda untuk mewujudkan pemuda berkualitas,
3. Mengawasi penyelenggaraan pengembangan kepemudaan guna mendukung pencapaian pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.
4. Membangun kemitraan, jejaring kerja, peran serta dan kerja sama dalam pengembangan pemuda di tingkat nasional maupun internasional.

5. Meningkatkan tata kelola kelembagaan, kompetensi ASN, penyederhanaan regulasi, penyesuaian birokrasi, dan peningkatan kecepatan pelayanan publik di Lingkungan Deputy Bidang Pengembangan Pemuda

C. Tujuan Organisasi

Dalam rangka mencapai Visi dan Misinya, Deputy Bidang Pengembangan Pemuda merumuskan tujuan yang menjadi dasar dalam penyusunan Sasaran Program Deputy Bidang Pengembangan Pemuda. Adapun tujuan tersebut adalah: mengembangkan kepemimpinan, kepeloporan, kesukarelawanan dan kewirausahaan pemuda untuk menciptakan pemuda yang berkualitas dan berdaya saing.

D. Sasaran Program

Sasaran Program pada Deputy Bidang Pengembangan Pemuda adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Program 1 (SP-1) adalah Meningkatnya partisipasi pemuda dalam bidang sosial, politik dan lingkungan hidup dengan indikator sebagai berikut:
 - a) Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan (kesukarelawanan dan kepeloporan);
 - b) Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan organisasi;
 - c) Persentase pemuda yang berperan aktif dalam Gerakan Pramuka .
2. Sasaran Program 2 (SP-2) adalah Meningkatnya pemuda berwirausaha dengan indikator: Persentase pemuda yang bekerja dengan status berusaha sendiri dan dibantu buruh (tetap dan tidak tetap).
3. Sasaran Program 3 (SP-3) adalah Meningkatnya peran aktif pemuda pada tingkat global dengan indikator sebagai berikut:
 - a) Persentase pemuda yang berperan aktif dalam forum internasional;
 - b) Persentase pemuda yang memperoleh penghargaan nasional dan internasional.
4. Sasaran Program 4 (SP-4) adalah Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan koordinasi lintas sektor pelayananan kepemudaan dengan indikator sebagai berikut:
 - a) Persentase Kementerian/lembaga yang terlibat aktif dalam pencapaian target RAN Pelayanan Kepemudaan ;
 - b) Persentase Provinsi yang menginisiasi penyusunan RAD dan pokja pelayanan kepemudaan.

E. Pohon Kinerja Deputy Bidang Pengembangan Pemuda



2.2 RENCANA KERJA

Penetapan Kinerja adalah pernyataan Komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam dokumen Penetapan Kinerja (PK). PK adalah dokumen pernyataan komitmen Pimpinan Organisasi/ Unit Kerja yang berisi target kinerja yang harus dicapai dalam periode tertentu dan rencana aksi yang dibutuhkan. Perjanjian kinerja merupakan implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, dan merupakan tekad dan janji yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. PK menjadi dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. Penetapan Kinerja Deputy Bidang Pengembangan Pemuda tahun 2024 secara rinci sebagai berikut:

NO	SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam bidang sosial, politik dan lingkungan hidup	1.1	Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan (kesukarelawanan dan kepeloporan)	
		1.2	Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan organisasi	
		1.3	Persentase pemuda yang berperan aktif dalam Gerakan Pramuka Persentase pembangunan infrastruktur pemuda	
2	Meningkatnya pemuda berwirausaha	2.1	Persentase pemuda yang bekerja dengan status berusaha sendiri dan dibantu buruh (tetap dan tidak tetap)	
3	Meningkatnya peran aktif pemuda pada tingkat global	3.1	Persentase pemuda yang berperan aktif dalam forum internasional	
		3.2	Persentase pemuda yang memperoleh penghargaan nasional dan internasional	
4	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan koordinasi lintas sektor pelayananan kepemudaan	4.1	Persentase Kementerian/lembaga yang terlibat aktif dalam pencapaian target RAN Pelayanan Kepemudaan	
		4.2	Persentase Provinsi yang menginisiasi penyusunan RAD dan pokja pelayanan kepemudaan	

Tabel 2. 1 Sasaran Program Deputy Bidang Pengembangan Pemuda Tahun 2024

2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Tercapainya pemuda yang berkarakter, berbudaya, mandiri, berdaya saing, semangat berwirausaha dan berwawasan luas serta berperan aktif dalam sosial kemasyarakatan, kepemimpinan dan kegiatan politik	Persentase Pemuda (16-30 Tahun) yang bekerja dengan status berusaha sendiri dan dibantu buruh (tetap dan tidak tetap) dalam jenis jabatan white collar	0,55%
		Tingkat kualitas pelaksanaan koordinasi lintas sektor pelayanan kepemudaan	84
		Pencapaian ketercapaian indikator Rencana Aksi Nasional Pelayanan Kepemudaan	80%
		Tingkat Kualitas Kepemimpinan Pemuda dan Kepeloporan Pemuda	80

Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama Deputi Bidang Pengembangan Pemuda 2024

2.4 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja digunakan untuk mengukur keberhasilan Indikator Kinerja dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan pada PK yang juga dicapai oleh kegiatan pendukung yang dilakukan oleh unit Deputi Bidang Pengembangan Pemuda.

Adapun pemetaan kegiatan yang disesuaikan dengan target kinerja dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini.

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Pengukuran Kinerja
1	Tercapainya pemuda yang berkarakter, berbudaya, mandiri, berdaya saing, semangat berwirausaha dan berwawasan luas serta berperan aktif dalam sosial kemasyarakatan, kepemimpinan, kepeloporan dalam kegiatan politik	Persentase pemuda (16-30 tahun) yang bekerja dengan status berusaha sendiri dan dibantu buruh (tetap dan tidak tetap) dalam jenis jabatan <i>white collar</i>	Hasil olah data dari survei Sakernas oleh Badan Pusat Statistik
		Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti kegiatan organisasi dalam 3 bulan terakhir	Hasil olah data dari survei Badan Pusat Statistik
		Tingkat Kualitas Pelaksanaan Koordinasi Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan	Hasil olah data dari survei yang dilaksanakan oleh Asisten Deputi Kemitraan Pemuda terhadap seluruh Kementerian/Lembaga yang terlibat dalam RAN Pelayanan Kepemudaan
		Pencapaian ketercapaian indikator Rencana Aksi Nasional Pelayanan Kepemudaan	Rata-rata capaian indikator Pelayanan Kepemudaan yang diambil dari data dashboard Pemantauan dan Pelaksanaan RAN Pelayanan Kepemudaan
		Tingkat Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda	Hasil olah data dari survei yang dilaksanakan oleh Asisten Deputi Kepemimpinan Pemuda dan Asisten Deputi Kepeloporan Pemuda terhadap seluruh stakeholder Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda
		Persentase Usia Muda (15-24 Tahun) yang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan	Hasil olah data dari survei Sakernas oleh Badan Pusat Statistik

2	Terwujudnya Deputi Bidang Pengembangan Pemuda yang berkinerja bersih, akuntabel, professional dan melayani	Nilai Penilaian Mandiri Sistem Akuntabilitas (PM SAKIP) Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	Adapun komponen SAKIP terdiri dari perencanaan kinerja dengan bobot penilaian 30%, pengukuran kinerja 25%, pelaporan kinerja 15%, evaluasi 10%. Kemudian, kinerja diukur dari capaian kinerja dengan bobot 20%
		Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	Nilai IKPA pada aplikasi OM-SPAN diperoleh dengan menjumlahkan seluruh nilai kinerja indikator dikalikan dengan bobot masing-masing indikator pada tingkat K/L
		Nilai Kinerja Anggaran pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	$NKI = (P \times Wp) + (K \times Wk) + (CRO \times Wcro) + (NE \times We)$ <p>NKI = Nilai Kinerja Anggaran aspek Implementasi</p>
		Persentase temuan LHP BPK yang ditindak lanjuti pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	Pengukuran indikator ini merujuk pada total temuan yang ada pada masing-masing Satuan Kerja yang akan disampaikan oleh Inspektorat melalui nota dinas kepada Deputi dengan rumus penghitungan

Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Pengembangan Pemuda 2024

2.5 POSTUR ANGGARAN

Adapun pagu anggaran Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Tahun 2024 adalah sebesar Rp 80.247.038.000.

Tabel 2.4 Postur Anggaran Deputi Bidang Pengembangan Pemuda 2024

Kegiatan	Anggaran
1. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	Rp 25.572.250.000
2. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda	Rp 21.512.300.000
3. Pengembangan Kepeloporan Pemuda	Rp 15.246.200.000
4. Pengembangan Kemitraan Pemuda	Rp 12.916.288.000

5. Dukungan Pelaksanaan Lainnya Pengembangan Pemuda	Manajemen Tugas Deputi	dan Teknis Bidang	Rp 5.000.000.000,00
Total Anggaran			Rp 80.247.038.000

Tabel 2. 4 Postur Anggaran Deputi Bidang Pengembangan Pemuda 2024

Pagu Anggaran tahun ini turun bila dibandingkan dengan pagu anggaran pada tahun sebelumnya
 Gambar Postur Anggaran Deputi Bidang Pengembangan Pemuda



Gambar 2. 1 Postur Anggaran Deputi Bidang Pengembangan Pemuda 2024

BAB III

EVALUASI CAPAIAN KINERJA

3.1 PENGUKURAN KINERJA DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA 2024

Akuntabilitas kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan sebelumnya, baik mengenai uraian rencana pencapaian kinerja atau target dan kemudian mengukur realisasinya.

Metode pengukuran pencapaian indikator kinerja yang digunakan dalam laporan ini, berdasarkan nilai aktual dari Indikator Kinerja Utama dibandingkan nilai target. Berdasarkan pembagian tersebut terdapat 3 kelompok IKU diantaranya yaitu IKU maximize (Nilai aktual/realisasi/pencapaian Indikator Kinerja diharapkan lebih tinggi dari target), IKU Minimize (Nilai aktual/realisasi/pencapaian Indikator Kinerja diharapkan lebih kecil dari target) dan IKU stabilize (Nilai aktual/realisasi/pencapaian Indikator Kinerja diharapkan berada dalam suatu rentang target tertentu). Namun Indikator Kinerja yang digunakan dalam sasaran program Deputi Bidang Pengembangan Pemuda menggunakan kelompok IKU Maximize. Selanjutnya capaian IKU ditetapkan berdasarkan ketentuan berikut:

RENTANG CAPAIAN	KATEGORI PENILAIAN CAPAIAN	KETERANGAN
] v H	Sangat Baik	Capaian diperoleh dari persentase capaian hasil pengukuran setiap indikator kinerja
90 s.d capaian < 100	Baik	
80 s.d capaian < 90	Cukup	
Capaian < 80	Kurang	

Gambar 3. 1 Kriteria Penilaian Ketercapaian Target Indikator

Pengukuran pada laporan ini dibatasi pada angka maksimal pencapaian 120%, sehingga jika terdapat, perbandingan realisasi dengan target yang melebihi angka dimaksud, maka akan dicantumkan nilai capaian 120%

3.2 CAPAIAN KINERJA

3.2.1 Akuntabilitas Kinerja

Dalam rangka mengukur capaian kinerja Deputi Bidang Pengembangan Pemuda, maka akuntabilitas kinerja yang akan diukur mencakup kinerja sasaran dan kinerja kegiatan. Indikator kinerja sasaran

ditetapkan dengan menggunakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran yang terkait dengan sasaran tersebut, yaitu berupa keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*). Adapun indikator kinerja dalam akuntabilitas kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Indikator kinerja yang digunakan dalam mengukur kinerja meliputi indikator kinerja sasaran dan indikator kinerja kegiatan. Penetapan indikator kinerja didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang ada.
2. Indikator kinerja sasaran merupakan ukuran keberhasilan pencapaian sasaran. Penetapan indikator kinerja beserta target capaian indikator kinerja ini mulai dilakukan pada saat perumusan rencana strategis, yaitu mulai dilakukan pada saat perumusan tujuan dan sasaran.
3. Dalam menetapkan indikator sasaran, digunakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran yang terkait dengan sasaran tersebut, yaitu dapat berupa keluaran (*output*) atau hasil (*outcome*).
4. Sistem pengumpulan, penyusunan dan, pengembangan data kinerja diarahkan guna mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap dan konsisten. Dalam sistem pengumpulan data kinerja, dapat diprediksi unit-unit yang bertanggung jawab menyelenggarakan catatan atau hal-hal lain yang berhubungan dengan data yang dibutuhkan untuk pengukuran kinerja.
5. Untuk memudahkan pengukuran kinerja sebagaimana diuraikan di atas digunakan formulir Pengukuran Kinerja sebagaimana terdapat dalam lampiran laporan ini.

Capaian Kinerja merupakan dasar dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah diperjanjikan. Capaian kinerja sasaran program atas Indikator Kinerja. Pada tahun 2024, Deputi Bidang Pengembangan Pemuda menetapkan 2 (dua) sasaran program/kegiatan dengan 11 (sebelas) indikator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan untuk menggambarkan tingkat pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan.

3.2.2 Capaian Kinerja Tahun 2024

Akuntabilitas kinerja dimulai dengan kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja, sistem pengumpulan data kinerja dan penetapan capaian kinerja, dilanjutkan dengan analisis capaian kinerja sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visinya.

Laporan Kinerja Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Tahun 2024 ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan kegiatan pengembangan kepemudaan dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi Deputi Bidang Pengembangan Pemuda yang mana merupakan turunan visi dan misi Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia.

Penghitungan persentase pencapaian rencana capaian (Formulir Pengukuran Kinerja), perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi:

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Capaian Kinerja}}{\text{Rencana Kinerja}} \times 100\%$$

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Capaian Kinerja} - (\text{Capaian Kinerja} - \text{Rencana Kinerja})}{\text{Rencana Kinerja}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja atas 11 indikator Kinerja Program (IKP) yang ditargetkan pada tahun 2024 sebanyak 6 IKP yang telah mencapai/melampaui target dan 5 IKP belum mencapai target dengan 2 IKP melampaui target dan 1 IKP belum melampaui target menggunakan data realisasi hasil pengukuran tahun 2023.

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Capaian	%	Kategori Capaian
1	Tercapainya pemuda yang berkarakter, berbudaya, mandiri, berdaya saing, semangat berwirausaha dan berwawasan luas serta berperan aktif dalam sosial kemasyarakatan, kepemimpinan, kepeloporan dalam kegiatan politik	Persentase pemuda (16-30 tahun) yang bekerja dengan status berusaha sendiri dan dibantu buruh (tetap dan tidak tetap) dalam jenis jabatan <i>white collar</i>	0,55%	0,47%	85,45	Cukup
		Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti kegiatan organisasi dalam 3 bulan terakhir	Meningkat (7,84%)	5,44%	69,39	Kurang
		Tingkat Kualitas Pelaksanaan Koordinasi Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan	84	91,18	108,55	Sangat Baik

		Persentase ketercapaian indikator Rencana Aksi Nasional Pelayanan Kepemudaan	80%	28,96	36,20	Kurang
		Tingkat Kualitas Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda	80	100	125	Sangat Baik
		Persentase Usia Muda (15-24 Tahun) yang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan	22,08 %	23,78%	92,85	Baik
2	Terwujudnya Deputi Bidang Pengembangan Pemuda yang berkinerja, bersih, akuntabel, profesional dan melayani.	Nilai Penilaian Mandiri Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (PM SAKIP) Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	78	75,67	97,01	Baik
		Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Pengembangan	88	77,52	88,09	Cukup
		Nilai Kinerja Anggaran pada Deputi Bidang Pengembangan	91	76,26	83,80	Cukup
		Persentase temuan LHP BPK yang ditindak lanjuti pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	75%	80	106,67	Sangat Baik

	Indeks kepuasan masyarakat pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	92	90.57	98,45	Baik
--	---	----	-------	-------	------

Tabel 3.1 Ringkasan Kinerja Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Tahun 2024

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 2)

LQGLNDWRU WHUFDSL3 LQGLNDWRU WBUWHULDD.SXU GHIJDO N
LQGLNDWRU GHQJDO NULWHULD ‡%DLN· GDQ LQGLNDWRU

3.2.3 Uraian Evaluasi Kinerja

Realisasi Kinerja Tahun 2024 berdasarkan sasaran program Deputi Bidang Pengembangan Pemuda dalam menjalankan fungsi utamanya sebagai perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pemuda diatur sebagai berikut:

Sasaran Program 1 : Tercapainya pemuda yang berkarakter, berbudaya, mandiri, berdaya saing, semangat berwirausaha dan berwawasan luas serta berperan aktif dalam social kemasyarakatan, kepemimpinan, kepeloporan dalam kegiatan politik

Pencapaian Sasaran program 1 diukur dengan enam (6) indikator kinerja program (IKP), yaitu:

1. Persentase pemuda (16-30 tahun) yang bekerja dengan status berusaha sendiri dan dibantu buruh (tetap dan tidak tetap) dalam jenis jabatan *white collar*
2. Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti kegiatan organisasi dalam 3 bulan terakhir
3. Tingkat Kualitas Pelaksanaan Koordinasi Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan
4. Pencapaian ketercapaian indikator Rencana Aksi Nasional Pelayanan Kepemudaan
5. Tingkat Kualitas Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda
6. Persentase Usia Muda (15-24 Tahun) yang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan

Capaian masing-masing IKP sebagaimana disajikan sesuai tabel dibawah ini.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
1.1	Persentase pemuda (16-30 tahun) yang bekerja dengan status berusaha sendiri dan dibantu buruh (tetap dan tidak tetap) dalam jenis jabatan <i>white collar</i>	Persen (%)	0,55%	0,47%	85,45	Belum Melampaui Target
1.2	Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti kegiatan organisasi dalam 3 bulan terakhir	Persen (%)	Meningkat (7,84%)	5,44%	69,39	Belum Melampaui Target
1.3	Tingkat Kualitas Pelaksanaan Koordinasi Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan	Orang	84	91,18%	108,55	Melampaui Target
1.4	Pencapaian ketercapaian indikator Rencana Aksi Nasional Pelayanan	Persen (%)	80%	28,96%	36,20	Belum Melampaui Target

1.5	Tingkat Kualitas Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda	Skor	80	100	120	Melampaui Target
1.6	Persentase Usia Muda (15-24 Tahun) yang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan	Persen (%)	22,08 %	23,78%	92,85	Belum Melampaui Target

Tabel 3. 2 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 1

Pencapaian target program pemuda yang berkarakter, berbudaya, mandiri, berdaya saing, semangat berwirausaha dan berwawasan luas serta berperan aktif dalam sosial kemasyarakatan, kepemimpinan, kepeloporan dalam kegiatan politik diuraikan sebagai berikut:

A. Persentase pemuda yang bekerja dengan status berusaha sendiri dan dibantu buruh (tetap dan tidak tetap).

Persentase pemuda yang bekerja dengan status berusaha sendiri dan dibantu buruh (tetap dan tidak tetap) diukur dengan menghitung realisasi jumlah pemuda wirausaha (didefinisikan sebagai pemuda bekerja dengan status pekerjaan utama berusaha mencakup berusaha sendiri, berusaha dibantu pekerja tidak dibayar/pekerja keluarga, dan berusaha dibantu buruh tetap/dibayar) yang terfasilitasi oleh Deputi Bidang Pengembangan Pemuda dibandingkan dengan target/sasaran jumlah pemuda wirausaha dalam perjanjian kinerja Deputi Bidang Pengembangan Pemuda tahun 2024. Target indikator kinerja ini pada tahun 2024 adalah sebesar 0,55 %. Realisasi kinerja ini sebesar 0,47% atau 85,45% dari target tahun 2024. Ada pun perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan sebesar 0,06%.

Sasaran Program/ Indikator Kinerja Program I					
Meningkatnya Pemuda yang kreatif, inovatif, mandiri, dan berdaya saing serta menumbuhkan semangat kewirausahaan					
Indikator Kinerja 1.1					
Persentase Pemuda yang bekerja dengan status berusaha sendiri dan dibantu buruh (tetap dan tidak tetap)					
Sasaran Outcome			Capaian Outcome		
0,55%			0,47%		
Sasaran Kegiatan Eselon II	Indikator Kinerja Eselon II	Sasaran	Realisasi	Capaian (%)	Lokus Eselon II
Meningkatnya kapasitas kelembagaan penyelenggaraan kepemudaan bidang peningkatan kewirausahaan pemuda yang optimal	Jumlah Pemuda yang difasilitasi sebagai kader kewirausahaan	13500 Orang	32400 Orang	240%	Asisten Deputi Kewirausahaan Pemuda
	Jumlah Wirausaha Muda Berprestasi Yang Memperoleh Fasilitas Akses Permodalan	50 Orang	50 Orang	100%	
	Meningkatnya jumlah fasilitasi Lembaga pengembangan kewirausahaan pemuda	55 Lembaga	52 Lembaga	95%	

Tabel 3. 3 Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Program Persentase pemuda yang bekerja dengan status berusaha sendiri dan dibantu buruh (tetap dan tidak tetap)

Indikator kinerja ini didukung oleh kegiatan yang dilakukan Asisten Deputi Kewirausahaan Pemuda yaitu berupa kegiatan Wirausaha muda berprestasi yang memperoleh akses permodalan dan kegiatan pemuda yang terfasilitasi sebagai kader kewirausahaan (kuliah kewirausahaan pemuda dan pengembangan kewirausahaan melalui pesantrenpreneur).

Perbandingan realisasi persentase pemuda yang bekerja dengan status berusaha sendiri dan dibantu buruh (tetap dan tidak tetap) tahun 2020 hingga 2024 beserta targetnya sebagai berikut:

Sasaran Program	Tahun 2020	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Persentase Pemuda yang bekerja dengan status berusaha sendiri dan dibantu buruh (tetap dan tidak tetap)			0,39%	0,41%	0,55%	0,48%	0,50%	0,53%	0,55%	0,47%

Tabel 3. 4 Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Program Persentase Pemuda yang bekerja dengan status berusaha sendiri dan dibantu buruh (tetap dan tidak tetap) Periode tahun 2020 - 2024

Ada pun perbandingan persentase pemuda (16-30 tahun) yang bekerja sebagai wirausaha/berusaha sendiri di negara-negara ASEAN pada tahun 2024:

Persentase Wirausaha Pemuda (16-30 tahun) di ASEAN

- Singapura: 4,4%
- Malaysia: 4,2%
- Thailand: 4,1%
- Indonesia: 0,55% ¹
- Filipina: 0,4%
- Vietnam: 0,3%
- Kamboja: 0,2%
- Laos: 0,1%
- Myanmar: 0,1%
- Brunei: tidak tersedia

Untuk indikator wirausaha kerah putih (*white collar*), menurun dari 0,55% menjadi 0,47%, setelah pada tahun 2021 mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19. Wirausaha kerah putih merupakan jenis usaha yang membutuhkan skill dan kompetensi tinggi sehingga mencerminkan pekerja yang berkualitas atau memiliki latar belakang pendidikan yang baik. Kemampuan pemuda untuk menjadi pekerja berusaha *white collar* diasosiasikan dengan kemampuan dan

kesinambungan dalam berusaha mandiri sehingga mencerminkan taraf hidup yang baik. Jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja, persebaran kerja yang tidak merata, pengangguran, Rendahnya kualitas tenaga kerja merupakan beberapa faktor yang menyebabkan penurunan wirausaha kerah putih.

Dalam melaksanakan program-program yang mendukung indikator ini terdapat beberapa hambatan diantaranya belum tersosialisasikannya program-program ini sehingga banyak pemuda yang tidak mengetahui adanya program-program tersebut.

Efisiensi terhadap penggunaan sumber daya pada program ini yakni dengan melaksanakan program secara daring melalui *video conference* maupun dengan mengunggah program tersebut pada media sosial.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian pada indikator ini, perlu adanya beberapa upaya yang akan dilakukan di tahun 2024 untuk meningkatkan capaian, diantaranya:

1. Mengkaji deskripsi target dan satuan capaian di program dan kegiatan sehingga lebih mencerminkan sejauh mana capaian yang sudah dilakukan;
2. Mengkaji program dan kegiatan yang dilakukan (evaluasi program kegiatan) sehingga terjadi peningkatan capaian;
3. Koordinasi lintas sektor kewirausahaan pemuda.

B. Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti kegiatan organisasi dalam 3 bulan terakhir

Indikator Kinerja Program Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan organisasi diukur dengan mengolah data yang diambil dari . Target Kinerja Indikator ini pada tahun 2024 adalah sebesar 7,84%. Realisasi kinerja ini sebesar 5,44% atau mencapai 64,5 % dari target tahun 2024. Nilai capaian ini tidak berubah dari tahun sebelumnya karena data ini diambil dari survei yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik per 3 (tiga) tahun.

Sasaran	Tahun 2020	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024
Program	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Persentase Pemuda yang bekerja dengan status berusaha sendiri dan dibantu buruh (tetap dan tidak tetap)	6,36%	6,36%	6,86%	4,84%	6,69%	4,84%	7,51%	5,44%	7,84%	5,44%

Tabel 3. 5 Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Program Persentase Pemuda yang mengikuti kegiatan organisasi Periode tahun 2020 -2024

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja program ini didukung oleh kegiatan yang dikelola unit kerja Asisten Deputi Kepemimpinan Pemuda dan Asisten Deputi Kepeloporan Pemuda dengan *output* Jumlah Lembaga/Komunitas kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan kepemimpinan pemuda, Jumlah pemuda kader yang terfasilitasi dalam *Youth Leadership Summit*, Jumlah pemuda yang terfasilitasi dalam pelatihan kader pemimpin muda nasional, Jumlah pemuda yang terfasilitasi dalam pelatihan kepemimpinan pemuda dalam rumah tangga, Jumlah pemuda yang terfasilitasi dalam pelatihan tanggap bencana, dan sebagainya.

Kegiatan dilaksanakan secara langsung/luring dan ada yang melalui tidak langsung atau secara online/daring dalam rangka efisiensi sumber daya.

Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan pendukung indikator kinerja program ini adalah Pandemi COVID-19 yang menyebabkan keterbatasan ruang gerak dalam mengikuti kegiatan organisasi. Namun, kendala tersebut bisa diatasi dengan memanfaatkan fasilitas daring dalam melakukan kegiatan berorganisasi.

Solusi atas hambatan tersebut adalah dengan meningkatkan peran komunitas dan organisasi dalam menggaet pemuda untuk dapat ikut serta aktif dalam organisasi dengan memaksimalkan penggunaan media sosial.

C. Tingkat kualitas pelaksanaan koordinasi lintas sektor pelayanan kepemudaan

Deskripsi Tingkat kualitas pelaksanaan koordinasi lintas sektor pelayanan kepemudaan adalah penggambaran kualitas koordinasi lintas sektor yang diselenggarakan oleh Kemenpora yang dalam hal ini di ampu oleh Deputi Bidang Pengembangan Pemuda sebagai leading sektor dalam rangka penyelenggaraan layanan kepemudaan yang terdiri dari 3 aspek yaitu aspek substansi, aspek teknis, aspek efektivitas. Aspek Substansi mengacu pada kebijakan, program dan manfaat.

Aspek Teknis mengacu pada Persiapan, Fasilitas dan Pelaksanaan. Aspek Efektivitas mengacu pada evaluasi dan tindak lanjut. Data yang diperlukan dalam menghitung tingkat kualitas koordinasi lintas sektor menggunakan instrumen yang dikumpulkan berdasarkan *stakeholder* yang terlibat dalam kegiatan koordinasi.

Indikator Kinerja Program Tingkat Kualitas Pelaksanaan Koordinasi Lintas Sektor pelayanan Kepemudaan diukur dengan menghitung hasil pengolahan Kuesioner Tingkat pelaksanaan Koordinasi Lintas Sektor yang diselenggarakan oleh Deputi Bidang Pengembangan Pemuda, khususnya di kegiatan Monitoring dan Evaluasi Asisten Deputi Kemitraan dan Penghargaan Pemuda. Target Kinerja indikator ini pada tahun 2024 adalah sebesar 84 (Kategori Baik). Realisasi kinerja indikator ini pada tahun 2024 mencapai nilai 91,18 (Kategori Sangat Baik) atau mencapai 109% dari target tahun 2024. Indikator kinerja Tingkat Kualitas Pelaksanaan Koordinasi Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan ini baru digunakan pada tahun 2023 sehingga belum ada perbandingan data pada tahun sebelumnya.

Berikut tabel capaian indikator pada rentang waktu 5 tahun terakhir:

Sasaran	Tahun 2020	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024
Program	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Tingkat Kualitas Pelaksanaan Koordinasi Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan	-	-	-	-	-	-	78%	86,89%	84%	91,18%

Tabel 3. 6 Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Program Pelaksanaan Koordinasi Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan Periode tahun 2020 -2024



Gambar 3. 2 Tingkat Kualitas Pelaksanaan Koordinasi Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan

Bila dilihat capaian pada tahun 2024 mengalami kenaikan dibanding capaian tahun 2023 sebesar 4,29%. Capaian ini berhasil memenuhi target yang ditetapkan. Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh kegiatan Asisten Deputi Kemitraan dan Penghargaan Pemuda berupa kegiatan Sosialisasi Perpres Tentang Koordinasi Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan dan Pendampingan RAN/RAD Tingkat Provinsi Tahun 2024 dalam program Rapat Koordinasi dengan *Stakeholder* Kepemudaan Pusat dengan Daerah. Kenaikan nilai kualitas ini disebabkan makin banyaknya Kementerian/Lembaga yang terlibat dalam Koordinasi Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan.

Saran kedepannya agar Deputi Bidang Pengembangan Pemuda melalui Asisten Deputi Kemitraan Pemuda dapat meningkatkan koordinasi dan konsolidasi dengan seluruh Kementerian/Lembaga yang terlibat dalam Koordinasi Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan. Terdapat efisiensi terhadap penggunaan sumber daya, yakni dengan melaksanakan koordinasi dan konsolidasi secara daring melalui *video conference* maupun surat elektronik.

D. Pencapaian ketercapaian indikator Rencana Aksi Nasional Pelayanan Kepemudaan

Indikator Kinerja Program Persentase Kementerian/Lembaga yang terlibat aktif dalam pencapaian target RAN Pelayanan Kepemudaan diukur dengan Target Kinerja Indikator ini pada tahun 2024 yakni sebesar 80% dari total indikator Rencana Aksi Nasional Pelayanan Kepemudaan yang dapat tercapai. Realisasi kinerja indikator ini pada tahun 2024 sebesar 28,96% indikator RAN Pelayanan Kepemudaan yang mana dari hasil tersebut memenuhi 36,20% dari target tahun 2024. Apabila diperbandingkan dengan capaian tahun 2023 yang bernilai 56,37% terdapat penurunan sebesar (27,41%).

Berikut perbandingan capaian indikatornya dengan capaian lima tahun terakhir, ada pun ketercapaian indikator Rencana Aksi Nasional Pelayanan Kepemudaan baru digunakan sebagai IKP dimulai di tahun 2022

Sasaran	Tahun 2020	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024
Program	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Persentase ketercapaian indikator Rencana Aksi Nasional Pelayanan Kepemudaan	-	-	-	-	50	90,05%	75%	56,37%	80%	30,36%

Tabel 3. 7 Tabel Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Program Persentase ketercapaian indikator Rencana Aksi Nasional Pelayanan Kepemudaan Periode tahun 2020 -2024

Pencapaian indikator yang belum optimal di 2024 ini disebabkan oleh beberapa faktor yakni:

1. Terdapat perubahan pada nomenklatur, indikator dan target RO di beberapa K/L;
2. Penghapusan RO karena adanya perubahan SOTK pada K/L;
3. Pada tahun 2024, banyak kegiatan dan RO yang sedang berjalan sehingga belum bisa dilaporkan capaiannya;
4. Adanya perubahan nomenklatur K/L imbas adanya pergantian Presiden 2024.

Meskipun belum optimal, tetapi dalam pelaksanaan kordinasi lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan telah banyak mengalami kemajuan, salah satunya adalah keterlibatan aktif dari anggota tim pengarah untuk mengkoordinasikan K/L yang berada dibawah koordinasinya.



Gambar 3. 3 Capaian Indikator RAN Pelayanan Kepemudaan 2024

Terdapat efisiensi terhadap penggunaan sumber daya, yakni dengan melaksanakan pengisian data capaian melalui Dashboard Pelaporan dan Pemantauan Pelaksanaan RAN Pelayanan Kepemudaan. Konfirmasi terhadap capaian tersebut pun dilaksanakan secara daring melalui *video conference* maupun surat elektronik.

E. Tingkat kualitas kepemimpinan dan kepeloporan pemuda

Tingkat kualitas kepemimpinan dan kepeloporan pemuda dilihat dari persentase pemerintah daerah yang responsif terhadap kebijakan pengembangan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda di level provinsi diukur dengan menghitung realisasi kehadiran jumlah stakeholder kepemudaan di level provinsi, dalam hal ini dinas pemuda dan olahraga di level provinsi, yang ditetapkan dalam undangan Kegiatan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pengembangan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda yang diselenggarakan Asisten Deputi Kepemimpinan Pemuda dan Asisten Deputi Kepeloporan Pemuda.

Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pengembangan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda merupakan program kerja sebagai upaya menyelaraskan kebijakan dan strategi yang dilaksanakan di pusat dalam mendorong rangka pengembangan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda di level provinsi sehingga nilai indeks kepemimpinan dan kepeloporan pemuda di level provinsi meningkat.

Sebagai indikator baru yang diampu oleh Asisten Deputi Kepemimpinan Pemuda dan Asdep Kepeloporan Pemuda, Persentase pemerintah daerah yang responsif terhadap kebijakan pengembangan kepemimpinan pemuda dan kepeloporan pemuda di level provinsi hanya bisa diperbandingkan dengan capaian target tahun lalu karena tidak adanya target indikator kinerja tahun 2022 ke bawah yang menjelaskan secara khusus mengenai pengembangan kepemimpinan pemuda dan kepeloporan pemuda di level provinsi. Capaian indikator di tahun 2024 dan tahun 2023 telah optimal yakni 100%, ada pun tabel perbandingan 5 tahun terakhir yakni sebagai berikut:

Sasaran	Tahun 2020	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024
Program	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Tingkat Kualitas dan Kepeloporan Pemuda	-	-	-	-	-	-	75%	100%	80%	100%

Tabel 3. 8 Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Program Tingkat Kualitas Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda Periode tahun 2020 -2024

Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pengembangan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda dalam menentukan indikator kinerja ini adalah:

1. Komitmen pimpinan pemerintah daerah dalam memantau dan mengupdate diri tentang kebijakan pengembangan kepemimpinan pemuda yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dalam hal ini asisten deputi kepemimpinan pemuda.
2. Kualitas pelaksanaan advokasi dan asistensi kebijakan pengembangan kepemimpinan pemuda yang diberikan oleh unit asisten deputi kepemimpinan pemuda ketika pemerintah daerah melakukan visitasi/kunjungan kerja ke pusat.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai indikator ini dikarenakan antara lain:

Kualitas kemampuan advokasi personel yang belum memadai;

Keterbatasan anggaran yang mengakibatkan tidak semua pemerintah daerah di level provinsi yang diundang ke kegiatan Rapat Koordinasi Pengembangan Kepemimpinan Pemuda

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mencapai kinerja ini antara lain:

1. Memprioritaskan pemerintah daerah yang memiliki nilai partisipasi dan kepemimpinan yang masih dalam berpredikat kurang.
2. Optimalisasi advokasi dilakukan secara virtual baik dengan video conference maupun chat interaktif karena belum memungkinkan pertemuan tatap muka kepada seluruh pemerintah daerah di level provinsi.

Langkah kedepan yang akan dilakukan untuk meningkatkan persentase pemerintah daerah yang responsif terhadap pengembangan kebijakan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda antara lain adalah:

1. Meningkatkan kapasitas SDM dengan sertifikasi pelatihan;
2. Peningkatan efektivitas pelaksanaan advokasi dengan mendesain mekanisme advokasi yang lebih akurat dan terstruktur.
3. Meningkatkan efektivitas media komunikasi eksternal guna mendukung *knowledge management* baik di internal maupun instansi pemerintah lain.
4. Membangun kerja sama dengan kementerian/lembaga lain untuk merumuskan kebijakan terkait pengembangan kepemimpinan di level provinsi. Hal ini sebagai stimulus untuk meningkatkan indikator partisipasi dan kepemimpinan dalam indeks pembangunan pemuda khususnya di level provinsi.

Terdapat efisiensi terhadap penggunaan sumber daya, yakni dengan optimalisasi advokasi dilakukan secara virtual baik dengan *video conference* maupun chat interaktif. Dengan

demikian dapat menjangkau lebih banyak daerah terutama yang lokasinya jauh serta efisiensi dalam pendanaan.

F. Persentase Usia Muda (15-24 Tahun) yang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan

Aktivitas pendidikan dan bekerja dipandang sebagai kegiatan produktif karena memberikan nilai tambah secara ekonomi. Dengan bekerja, pemuda dapat memperoleh upah/pendapatan. Sementara itu, dengan menempuh pendidikan, pemuda diharapkan akan mendapat pengembalian penghasilan pada saat bekerja nanti. Hal tersebut sesuai dengan asumsi dasar teori *Human Capital* bahwa seseorang dapat meningkatkan penghasilannya melalui peningkatan pendidikan.

Sebaliknya, pemuda yang tidak bersekolah dan tidak bekerja dianggap tidak produktif karena potensinya tidak diberdayakan. Kondisi ini dimonitor dalam salah satu indikator dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) yaitu persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, tidak bekerja, dan tidak mengikuti pelatihan (*Not in Employment, Education, and Training/NEET*). Dengan kata lain, NEET menggambarkan penduduk usia muda (15-24 tahun) yang tidak berada dalam dunia pendidikan (sekolah/pelatihan/kursus/training) atau tidak terserap pasar kerja. Persentase penduduk usia 15-24 tahun yang berstatus NEET di Indonesia mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi sebesar 23,78%, dari sebelumnya pada tahun 2023 sebesar 25,8% (BPS 2024). Penggunaan indikator NEET dinilai lebih komprehensif dibandingkan dengan tingkat pengangguran karena dapat melihat dinamika dan keaktifan pemuda dalam pasar tenaga kerja (Anggraini, 2020). NEET baru digunakan sebagai IKP sejak 2023, maka perbandingan NEET dalam lima tahun terakhir tertera seperti berikut:

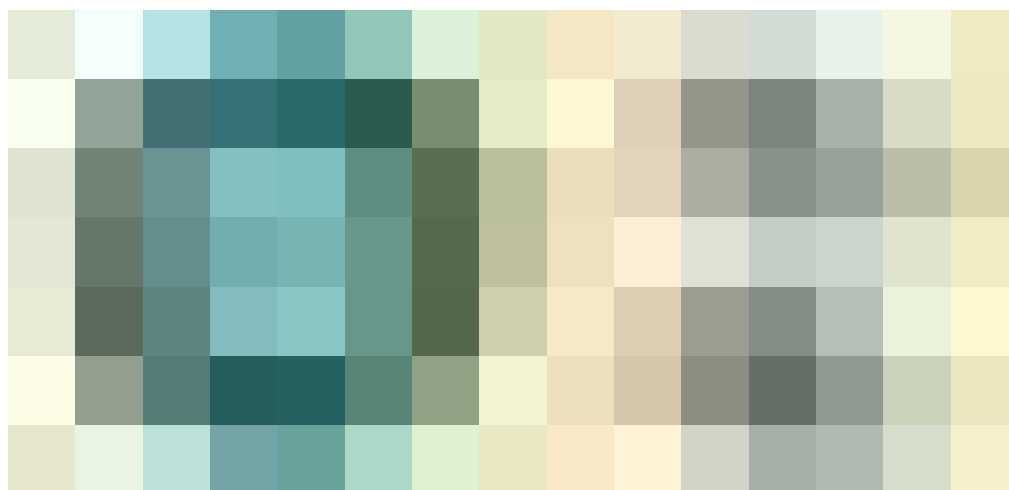
Sasaran	Tahun 2020	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024
Program	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Persentase Usia Muda (15-24 Tahun) yang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan	-	-	-	-	-	-	23,58%	25,80%	22,08%	23,78%

Tabel 3. 9 Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Program Persentase NEET Periode tahun 2020 -2024

Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2024, pemuda yang berstatus NEET sebesar 23,78%. Artinya, setidaknya terdapat 24 dari 100 pemuda tidak bekerja, tidak bersekolah, maupun tidak sedang mengikuti pelatihan/kursus/training. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, terdapat

disparitas yang cukup lebar antara pemuda laki-laki dan perempuan yang berstatus NEET. Persentase pemuda perempuan yang tergolong NEET adalah dua kalinya persentase pemuda laki-laki yang tergolong NEET (33,10% berbanding 14,98%). Hal tersebut dapat dimungkinkan mengingat pemuda Perempuan tengah berada pada masa reproduktif (usia subur) sehingga banyak yang sudah menikah dan berumah tangga (Adioetomo & Indrayanti, 2018). Lebih jauh, hal tersebut didukung oleh pendapat (Ehrenberg dan Smith, 2012) yang menyatakan bahwa Perempuan sebagai istri akan lebih mempertimbangkan kepentingan keluarga Ketika memutuskan untuk masuk ke pasar kerja atau melanjutkan pendidikan.

Berdasarkan kelompok umur, 19-24 tahun menjadi kelompok pemuda yang banyak berstatus NEET (26,37 persen). Pada umur 19-24 tahun, pemuda cenderung telah menyelesaikan Pendidikan formal dan menghadapi tantangan untuk mendapatkan pekerjaan. Selanjutnya, kelompok umur 25-30 tahun, yaitu sebesar 25,99 persen dan kelompok umur 16-18 tahun sebesar 14,56 persen. Meskipun pada kelompok umur 16-18 tahun memiliki persentase NEET terendah dibanding kelompok umur lainnya, namun yang perlu diperhatikan bahwa pada kelompok ini seharusnya pemuda sedang mengenyam pendidikan formal, setidaknya pada jenjang pendidikan menengah atas. Sehingga angka ini perlu menjadi perhatian pemerintah, karena terdapat sejumlah 14 dari 100 orang pemuda pada usia 16-18 tahun yang sudah tidak sedang bersekolah, tidak bekerja, maupun sedang tidak mengikuti kursus.



Gambar 3. 4 Data NEET 2024

Sumber: Statistik Pemuda 2024 (BPS, 2024)

Ada pun perbandingan dengan NEET negara lain dalam laporan ini menggunakan data NEET Negara Inggris yakni sebesar 13,2% per Juli-September 2024. Untuk mencapai target indikator ini, Asisten Deputi Kewirausahaan Pemuda telah melaksanakan beberapa programnya, diantaranya:

Sasaran Program/ Indikator Kinerja Program I					
Meningkatnya Pemuda yang kreatif, inovatif, mandiri, dan berdaya saing serta menumbuhkan semangat kewirausahaan					
Indikator Kinerja 1.6					
Persentase Usia Muda (15-24 Tahun) yang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan					
Sasaran Outcome			Capaian Outcome		
22,08%			23,78		
Sasaran Kegiatan Eselon II	Indikator Kinerja Eselon II	Sasaran	Realisasi	Capaian (%)	Lokus Eselon II
Meningkatnya kapasitas kelembagaan penyelenggaraan kepemudaan bidang peningkatan kewirausahaan pemuda yang optimal	Jumlah Pemuda yang difasilitasi sebagai kader kewirausahaan	13500 Orang	32400 Orang	240%	Asisten Deputi Kewirausahaan Pemuda
	Jumlah Wirusaha Muda Berprestasi Yang Memperoleh Fasilitas Akses Permodalan	50 Orang	50 Orang	100%	
	Meningkatnya jumlah fasilitasi Lembaga pengembangan kewirausahaan pemuda	55 Lembaga	52 Lembaga	95%	

Tabel 3. 10 Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Program Persentase Usia Muda (15-24 Tahun) yang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan

Program-program tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi sumber daya, dengan cara pelaksanaan program secara virtual baik dengan *video conference* maupun chat interaktif dan penggunaan narasumber lokal.

Dalam melaksanakan beberapa program tersebut, terdapat beberapa hambatan diantaranya cakupan dan jangkauan program belum mencapai seluruh pemuda (selama ini baru bekerjasama dengan kampus sehingga cakupan terbatas pada mahasiswa) dan belum adanya pengarusutamaan gender dalam program yang dilaksanakan.

Untuk lebih dapat menekan angka NEET di tahun-tahun ke depan harus diperhatikan hal-hal berikut ini:

1. Memastikan cakupan dan jangkauan program agar dapat menjangkau seluruh kalangan pemuda;
2. Memastikan adanya kesetaraan gender untuk menurunkan persentase NEET pada pemuda yang berjenis kelamin perempuan.

Sasaran Program 2 : Terwujudnya Deputi Bidang Pengembangan Pemuda yang berkinerja bersih, akuntabel, professional dan melayani

Pencapaian Sasaran Program ~~1~~ 7 Terwujudnya Deputi Bidang Pengembangan Pemuda yang berkinerja bersih, akuntabel, professional dan PHODDOL dengan menggunakan 5 (lima) indikator kinerja program (IKP), yaitu:

1. Nilai Sistem Akuntabilitas (SAKIP) Deputi Bidang Pengembangan Pemuda
2. Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Pengembangan Pemuda
3. Nilai Kinerja Anggaran pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda
4. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda
5. Indeks Kepuasan Masyarakat Deputi Bidang Pengembangan Pemuda

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
4.1	Nilai Sistem Akuntabilitas (SAKIP) Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	Indeks (Skala 100)	78	75,67	97,01	Belum Melampaui target
4.2	Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	Indeks (Skala 100)	88	77,52	4,85	Belum Melampaui target
4.3	Nilai Kinerja Anggaran pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	Indeks (Skala 100)	91	76,26	-10,81	Belum Melampaui target
4.4	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	Persen	75	80	106,67	Melampaui target
4.5	Indeks Kepuasan Masyarakat Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	Indeks (Skala 100)	92	90,57	98,45	Belum Melampaui target

Tabel 3. 11 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 2

Pencapaian target program peningkatan tata kelola kelembagaan yang bersih, akuntabel, kapabel dan pelayanan yang prima di Lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda diuraikan sebagai berikut:

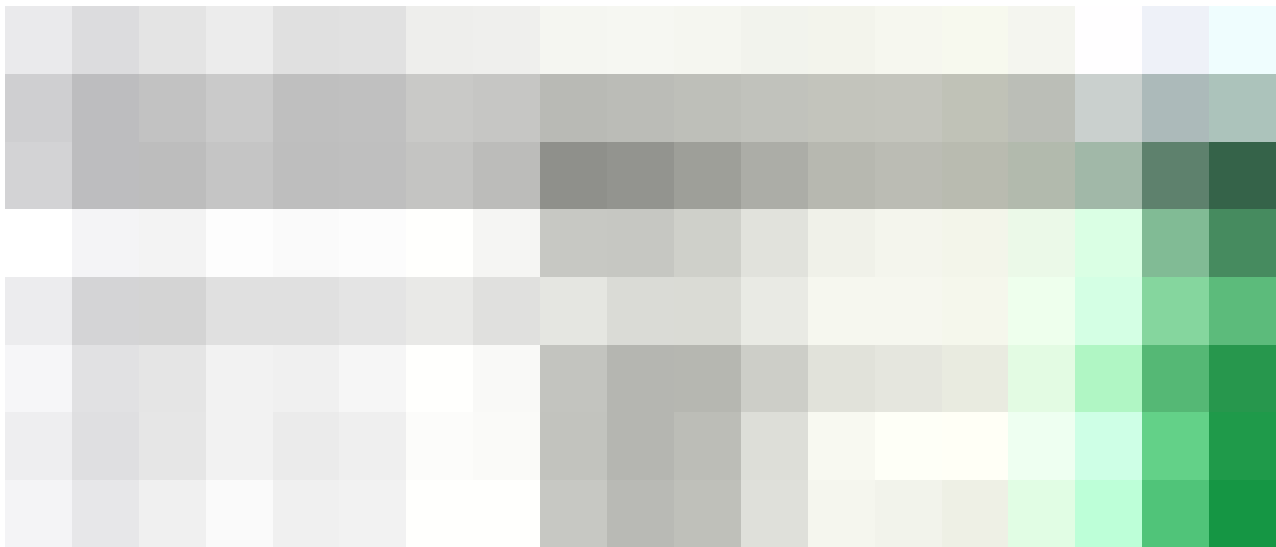
A. Nilai Sistem Akuntabilitas (SAKIP) Deputi Bidang Pengembangan Pemuda

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Evaluasi atas implementasi SAKIP dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja secara lengkap dan

menyeluruh. Kelima komponen manajemen kinerja tersebut adalah : 1) Perencanaan Kinerja; 2) Pengukuran Kinerja; 3) Pelaporan Kinerja; 4) Evaluasi Kinerja; dan 5) Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi.

Indikator Kinerja Nilai Sistem Akuntabilitas (SAKIP) Deputy Bidang Pengembangan Pemuda seharusnya mengacu pada nilai hasil evaluasi SAKIP Deputy Bidang Pengembangan Pemuda Tahun 2024 yang dilakukan oleh Tim Evaluasi Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga. Namun nilai SAKIP Deputy Bidang Pengembangan Pemuda Tahun 2024 belum bisa didapatkan karena masih dalam proses penilaian yang nilainya keluar pada akhir Januari 2024, maka dalam pengisian Nilai SAKIP Deputy Bidang Pengembangan Pemuda tahun 2024 sementara ini mengacu pada Nilai SAKIP Deputy Bidang Pengembangan Pemuda Tahun 2023 yang tertuang di Nota Dinas Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat perihal Hasil Evaluasi Laporan Kinerja Eselon I dan II di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2023.

Dalam surat tersebut disampaikan bahwa Nilai SAKIP Deputy Bidang Pengembangan Pemuda Tahun 2023 berada pada nilai 75,67, dengan interpretasi **Sangat % D L**Ma dibandingkan dengan target Nilai Sistem Akuntabilitas (SAKIP) Deputy Bidang Pengembangan Pemuda pada tahun 2024 yang sebesar 78%, maka penilaian capaian kinerja tahun 2024 yang terkait Nilai SAKIP Deputy Bidang Pengembangan Pemuda belum dapat memenuhi target.



Gambar 3. 5 Nilai Evaluasi SAKIP Internal

Sasaran	Tahun 2020	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024
Program	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Nilai Penilaian Mandiri Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (PM SAKIP) Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	-	-	72,5	64,42	70	69,8	68	75,67	78	75,67

Tabel 3. 12 Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Program Nilai Evaluasi SAKIP Internal Periode tahun 2020 -2024

Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, nilai PM SAKIP Deputi Bidang Pengembangan Pemuda mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Namun masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki, antara lain:

1. Dokumen renstra belum direviu secara berkala
2. Rencana aksi belum dimonitor pencapaiannya secara berkala;
3. Belum dilakukan pengumpulan data kinerja atas rencana aksi secara berkala (bulanan/triwulanan/semester)
4. Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV ke atas belum dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) *reward and punishment*.

Langkah ke depan yang akan dilakukan oleh Deputi Bidang Pengembangan Pemuda adalah

1. Melakukan perbaikan dokumen perencanaan pada unit kerja dengan memperhatikan berbagai kaidah dalam penyusunan dokumen perencanaan kinerja, seperti memastikan tujuan

- dan sasaran strategis telah berorientasi hasil atau manfaat langsung yang dirasakan masyarakat (*result oriented*), memastikan kualitas indikator kinerja agar terkait dengan karakteristik keterukuran, relevansi dan orientasi hasil yang selaras dengan sasaran strategis;
2. Melakukan reviu dan penyempurnaan untuk memastikan kualitas penjabaran kinerja hingga ke level jabatan terendah, dengan memperhatikan *logical framework* dan *critical success factor* (CSF) dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi;
 3. Meningkatkan kualitas evaluasi program dengan melakukan evaluasi yang didasarkan pada capaian hasil program dan keterpaduan lintas program unit kerja serta memastikan setiap program dan kegiatan memiliki keterkaitan secara langsung terhadap pencapaian Sasaran strategis;
 4. Melakukan pengumpulan data kinerja atas rencana aksi secara berkala dan melakukan analisis sumber daya dalam kaitannya dengan pencapaian program dan kegiatan;
 5. Menyusun dan melakukan monitoring rencana aksi kinerja secara berkala.

B. Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Pengembangan Pemuda

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan *tools* yang menggunakan konsep Penganggaran Berbasis Kinerja/*Performance Based Budgeting*. Penganggaran Berbasis Kinerja adalah sebuah pendekatan dalam sistem penganggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara anggaran yang dialokasikan dengan prestasi kerja atau kinerja yang diharapkan berupa keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*), termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut sesuai dengan tugas pokok Kementerian Negara/Lembaga.

IKPA telah efektif meningkatkan perhatian K/L terhadap tata kelola pelaksanaan anggaran yang dibuktikan dengan semakin membaiknya tingkat kepatuhan K/L terhadap regulasi pelaksanaan anggaran, dan peningkatan kinerja indikator pada IKPA sebagaimana diatur dalam Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2021 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

Kemudian dilakukan evaluasi capaian IKPA untuk selanjutnya dilakukan perubahan paradigma penilaian kinerja pelaksanaan anggaran yang sebelumnya fokus pada peningkatan tata kelola pelaksanaan anggaran menjadi fokus pada peningkatan kualitas belanja yang didukung oleh akselerasi belanja dan capaian *output* agar mampu berkontribusi optimal dalam membentuk *outcome* perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini kemudian diwujudkan dalam bentuk Reformulasi IKPA.

Reformulasi IKPA merupakan perubahan tata cara penilaian kinerja pelaksanaan anggaran melalui penajaman paradigma belanja berkualitas dengan tetap menjaga tata kelola pelaksanaan anggaran. Tujuan reformulasi IKPA adalah untuk mendukung belanja berkualitas dengan penguatan *value for money* dalam penilaian kinerja pelaksanaan anggaran, mendorong akselerasi belanja dan pencapaian *output* belanja, dan Penetapan kewajaran perlakuan (*fairness treatment*) dalam penilaian kinerja pada Satker, Eselon I, dan K/L, khususnya berdasarkan alokasi anggaran dan karakteristik belanja.

Indikator Kinerja Nilai Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Pengembangan Pemuda diperoleh dari Nilai keluaran Aplikasi OM-SPAN Kementerian Keuangan. Target Indikator Nilai Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Pengembangan Pemuda berada pada nilai angka 76,82. Realisasi IKPA Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Tahun 2024 belum memenuhi nilai target capaian yang hanya mencapai nilai sebesar 88, sebagaimana tergambar dalam gambar dibawah ini.



Gambar 3. 6 IKPA Deputi Bidang Pengembangan Pemuda 2024

(Sumber: <http://spanint.kemenkeu.go.id/> (diakses pada 16 Januari 2025))

Penggunaan IKPA sebagai IKP baru diberlakukan pada tahun 2021 sehingga perbandingan realisasi Nilai Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 5 tahun terakhir dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran	Tahun 2020	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024
Program	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian

Nilai IKPA	-	-	83.5	79.96	80	78.37	87%	72,67%	88%	77,52%
------------	---	---	------	-------	----	-------	-----	--------	-----	--------

Peningkatan nilai IKPA Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Tahun 2024 disebabkan antara lain:

Tabel 3. 13 Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Program Nilai IKPA Periode tahun 2020 - 2024

1. Rendahnya rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan sehingga nilai Deviasi Halaman III DIPA sangat rendah;
2. Kurangnya akurasi antara rencana penarikan dana dengan realisasi pembayaran;
3. Pengelolaan UP/TUP yang belum optimal.

Alternatif solusi atas ketidakcapaian IKP ini adalah Deputi Bidang Pengembangan Pemuda melalui Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Pemuda akan terus melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pengawasan pengelolaan kinerja keuangan yang berhubungan erat dengan ketaatan terhadap peraturan pengelolaan keuangan, kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta aktivitas pengelolaan uang.

G. Nilai Kinerja Anggaran Pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda

Nilai kinerja anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Nilai diperoleh dari data *input* dan *output* yang dimasukkan setiap Satuan Kerja Lingkup Deputi Bidang Pengembangan Pemuda ke dalam aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) Kementerian Keuangan.

Aplikasi SMART adalah aplikasi berbasis web yang dibangun guna memudahkan satuan kerja dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran. Aplikasi ini dibangun oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI sebagai alat pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, evaluasi kinerja anggaran terdiri atas Evaluasi Kinerja Anggaran Reguler dan Evaluasi Kinerja Anggaran Non-Reguler. Evaluasi Kinerja Anggaran Reguler dilaksanakan secara berkala paling sedikit dua kali dalam satu tahun, satu kali untuk tahun anggaran berjalan dan satu kali untuk tahun anggaran sebelumnya. Kriteria pada SMART merupakan pencapaian kinerja atas

penggunaan anggaran yang tertuang dalam tuisi kerja berupa keluaran dari kegiatan atau program, dan hasil dari program dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Penghitungan efisiensi pada aplikasi SMART yaitu dengan membandingkan capaian *output* dengan penyerapan anggaran. Dasar hukum terkait penghitungan efisiensi terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran.

Indikator Kinerja Nilai Kinerja SMART Deputy Bidang Pengembangan Pemuda diperoleh dari Nilai keluaran Aplikasi E –SMART Kementerian Keuangan. Target Indikator Nilai Kinerja SMART Deputy Bidang Pengembangan Pemuda berada pada nilai angka 76,26 dengan Intepretasi Cukup. Realisasi Nilai SMART Deputy Bidang Pengembangan Pemuda belum memenuhi nilai target capaian yang mencapai nilai sebesar 91 (per 9 januari 2025), sehingga realisasi capaiannya sebesar 83,80% dari target tahun 2024.

Gambar 3. 7 Capaian SMART Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Tahun 2024

(Sumber: <https://smart.kemenkeu.go.id> Per 16 Januari 2025)

Nilai SMART baru dijadikan IKP pada tahun 2021, sehingga perbandingan Nilai SMART Deputi Bidang Pengembangan Pemuda dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Sasaran	Tahun 2020	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024
Program	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Nilai Kinerja Anggaran pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	-	-	83.5	79.96	80	78.37	87%	72,67%	88%	76,26%

Tabel 3. 14 Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Program Nilai Kinerja Anggaran Periode tahun 2020 -2024

Monitoring dan Evaluasi yang telah dilakukan sepanjang tahun 2024, sebagai pembanding dari tahun 2021, cukup membantu satuan kerja dalam memahami pengisian capaian pada aplikasi SMART dan strategi yang dapat dilakukan agar bisa mencapai target nilai SMART Deputi Bidang Pengembangan Pemuda. Untuk itu monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan diseluruh satuan kerja harus terus berlanjut untuk merumuskan strategi peningkatan nilai SMART tahun 2024 serta upaya perbaikan utamanya pada indikator yang nilainya masih cukup rendah atau belum optimal dengan meningkatkan sinergitas antara pelaksana kegiatan dengan pengelola keuangan serta lebih mematuhi regulasi-regulasi terkait pelaksanaan dan pertanggungjawaban

anggaran. Kedepannya bisa dipertimbangkan pemberian penghargaan satker berprestasi dengan capaian realisasi anggaran, SMART dan IKPA.

H. Persentase temuan LHP BPK yang ditindak lanjuti pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Meningkatnya kualitas pengelolaan organisasi pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda yang berkinerja, bersih, akuntabel dan profesional.	Persentase temuan LHP BPK yang ditindak lanjuti pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	75%	80%

Tabel 3. 15 Persentase temuan LHP BPK yang ditindaklanjuti Pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda

Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) merupakan hasil pemeriksaan laporan keuangan Lembaga pemerintahan yang dilakukan BPK. Hasil dari dokumen tersebut menyajikan tiga hal, yaitu opini audit, temuan audit, dan kesimpulan atau rekomendasi BPK RI. Dalam LHP BPK Deputi Bidang Pengembangan Pemuda terdapat temuan pemeriksaan berupa Pelaksanaan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Tidak Sesuai Ketentuan senilai Rp247.256.700 yang kemudian menghasilkan dua rekomendasi kepada Menteri Pemuda dan Olahraga untuk menginstruksikan Deputi Pengembangan Pemuda agar:

1. Melakukan pengendalian yang memadai atas pelaksanaan pertanggungjawaban perjadi dalam negeri;
2. Memerintahkan PPK dan BPP di lingkungan kerjanya agar melakukan pengujian pertanggungjawaban belanja perjadi dan mempedomani ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan rekomendasi tersebut Deputi Bidang Pengembangan Pemuda melakukan tindak lanjut berupa penerapan Surat Edaran Nomor 6.26.17 Tahun 2023 Tentang Pertanggungjawaban Biaya Transportasi Darat Dalam Rangka Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Di Lingkungan Kementerian Pemuda Dan Olahraga Tahun Anggaran 2023. Dalam surat edaran tersebut disampaikan bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri

biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at cost*), dengan batas paling tinggi sesuai ketentuan Satuan Biaya Masukan tahun 2023.

Sasaran	Tahun 2020	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024
Program	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Persentase temuan LHP BPK yang ditindak lanjuti pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	-	-	-	-	-	-	70%	80%	75%	80%

Tabel 3. 16 Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Program Persentase temuan LHP BPK yang ditindaklanjuti Pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Periode tahun 2020 -2024

I. Indeks Kepuasan Masyarakat Deputi Bidang Pengembangan Pemuda

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Untuk memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat maka dalam dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat diperlukan metode survei yang seragam sebagaimana diatur Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Deputi Bidang Pengembangan Pemuda diukur dengan menghitung hasil pengukuran kuesioner yang disebarkan kepada masyarakat Deputi pengembangan pemuda periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 melalui aplikasi Elektronik Survei Kepuasan Masyarakat Kemenpora (E-SKM) melalui kanal <https://skm.kemenpora.go.id/>. Target Kinerja Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Deputi Bidang Pengembangan Pemuda pada tahun 2023 berada pada nilai indeks 92. Realisasi penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat Deputi Pengembangan Pemuda pada tahun 2024 sebesar 90,57 (Kategori Baik), sehingga hasil capaian adalah 98,45% dari target Kinerja Nilai Indeks Survei Kepuasan Masyarakat Deputi Pengembangan Pemuda tahun 2024.

Berdasarkan Permenpan RB No 14 Tahun 2017, nilai survei kepuasan Masyarakat dapat dikategorikan sebagai berikut:

No.	Rentang Nilai	Kategori
1	25.00 - 64.99	Tidak baik
2	65.00 - 76.60	Kurang Baik
3	76.61 - 88.30	Baik
4	88.31 -100.00	Sangat baik

Tabel 3. 17 Rentang Nilai SKM

Terdapat 9 (sembilan) unsur yang dilihat pada survei kepuasan Masyarakat yaitu 1) persyaratan; 2) sistem, mekanisme, dan prosedur; 3) waktu penyelesaian; 4) biaya/tarif; 5) produk spesifikasi jenis pelayanan; 6) kompetensi pelaksana; 7) perilaku pelaksana; 8) penanganan pengaduan, saran dan masukan; dan 9) sarana dan prasarana.

No.	Unsur SKM	Total Skor	Indeks	Keterangan
1	Persyaratan	4335	88,98	Sangat Baik
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	4329	88,85	Sangat Baik
3	Waktu Penyelesaian	4277	87,79	Baik
4	Biaya/Tarif	4598	94,38	Sangat Baik
5	Produk Spesifikasi jenis	4315	88,57	Sangat Baik
6	Kompetensi Pelaksana	4367	89,63	Sangat Baik

7	Perilaku Pelaksana	4418	90,68	Sangat Baik
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan	4705	96,57	Sangat Baik
9	Sarana dan Prasarana	4369	89,68	Sangat Baik

Tabel 3. 18 Hasil Survei Kepuasan Masyarakat

(Sumber: <https://skm.kemenpora.go.id>)



Gambar 3. 8 Perbandingan Capaian Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Deputi Bidang Pengembangan Pemuda 2024

(Sumber: <https://skm.kemenpora.go.id>)

IKM mulai dijadikan IKP pada tahun 2022, Jika dilihat dari capaian dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024, terdapat tren persentase capaian yang fluktuatif sejak tahun 2022. Hal ini antara lain dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah responden yang menjadi pembagi dalam rumusan nilai indeks kepuasan masyarakat.

Sasaran	Tahun 2020	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024
Program	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Indeks kepuasan masyarakat pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	-	-	-	-	82%	88,20%	90%	79,49%	92%	90,57%

Tabel 3. 19 Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Program Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat Periode tahun 2020 -2024

Atas pelaksanaan evaluasi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 didapati bahwa pelaksanaan pelayanan sudah teraplikasikan dengan cukup baik, namun masih ada beberapa yang perlu ditingkatkan dalam pelayanan, terutama unsur Waktu Penyelesaian. Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Waktu penyelesaian pelayanan masih dirasakan lambat oleh masyarakat dan Standar Operasional Prosedur yang perlu ditinjau kembali.
2. Kurang aktifnya unit pelayanan dalam menyebarluaskan survei kepuasan masyarakat dalam periode waktu tertentu.

Sehubungan dengan hasil evaluasi tersebut, maka hal-hal yang telah dan akan terus dilakukan untuk mempertahankan serta meningkatkan capaian indikator kinerja ini, yaitu melakukan koordinasi antara Asisten Deputi untuk pembahasan dan evaluasi hasil survei kepuasan masyarakat, serta digitalisasi layanan yang berdampak pada penyederhanaan bisnis proses dan SOP juga perlu disesuaikan. SOP juga penting dalam menentukan tenggat waktu pelayanan. Penyederhanaan birokrasi yang telah mulai dijalankan di Kementerian Pemuda dan Olahraga diharapkan juga mampu memangkas alur birokrasi sehingga dapat mempersingkat waktu pelayanan.

Pelaksanaan survei kepuasan Masyarakat dilaksanakan secara digital dengan mengisi survei pada tautan yang tersedia pada kanal skm.kemempora.go.id. Dengan demikian terdapat efisiensi sumber daya yang dilaksanakan.

3.3 ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA

Efisiensi anggaran berdasarkan Kepmenpora No 133 Tahun 2024 dihitung dari besaran persentase realisasi anggaran dibagi oleh persentase capaian kinerja. Analisis efisiensi sumber daya pada Deputi bidang Pengembangan Pemuda per sasaran program yakni:

ASUMSI ANGGARAN AWAL

Jenis Sasaran Program	Anggaran	Realisasi	% Realisasi	% Capaian	% Efisiensi	Kategori
Sasaran Program 1	5.000.000.000,00	4.077.689.519,00	91,64%	85,69%	106,95%	Kurang efisien
Sasaran Program 2	75.247.038.000	68.651.452.587	81,55%	94,80%	86,02%	Efisien

ASUMSI SETELAH PENGHEMATAN PERJADIN

Jenis Sasaran Program	Anggaran	Realisasi	% Realisasi	% Capaian	% Efisiensi	Kategori
Sasaran Program 1	4.370.888.000,00	4.077.689.519,00	93,29%	85,69%	108,88%	Kurang efisien
Sasaran Program 2	69.831.150.000	68.651.452.587	98,31%	94,80%	103,70%	Kurang Efisien

3.4 DUKUNGAN TERHADAP PRIORITAS NASIONAL

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2022 Tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu:

- 1. Prioritas Nasional I : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;**
- 2. Prioritas Nasional III : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;**
- 3. Prioritas Nasional IV : Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;**
- 4. Prioritas Nasional VII: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.**

Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dan Target serta Realisasi Pencapaian *Output* dari masing-masing Prioritas Nasional adalah sebagai berikut:

1. PN I Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.

Pelaksanaan PN I diantaranya melalui:

- A. 1 Program Prioritas/PP yakni (1) Penguatan Kewirausahaan, UMKM, dan Koperasi.
- B. 1 Kegiatan Prioritas/KP yakni (1) Peningkatan Penciptaan *Start Up* dan Peluang Usaha.
- C. 1 Proyek Prioritas/ProP yakni (1) Pelatihan Kewirausahaan.

PN I tersebut tersebar pada 3 Satker dimana Pagu di Deputi Bidang Pengembangan Pemuda mencapai Rp15.260.922.000.00 dan realisasi sebesar Rp14.216.328.393 atau 93.16% dengan rincian sebagai berikut:

Capaian Output Prioritas Nasional I

Nama Satker	Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output Strategis	Target	Capaian Output Strategis	%
Bidang Pengembangan Pemuda	PP : Penguatan Kewirausahaan , UMKM, dan Koperas KP : Peningkatan Penciptaan Start Up dan Peluang Usaha RO: 3808.QDC.001 Pemuda yang terfasilitasi sebagai kader kewirausahaan	15,260,92 2,000.00	14,216,328,3 93.00	93.1 6%	Orang	13.400 ,0000	31,691.00 00	100 %

2. PN III Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

Pelaksanaan PN III diantaranya melalui:

- A. 1 Program Prioritas/PP yakni (1) Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda;
- B. 1 Kegiatan Prioritas/KP yakni (1) Kualitas Pemuda;
- C. 2 Proyek Prioritas/ProP yakni: (1) Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Koordinasi Lintas Sektor Layanan Kepemudaan, (2) Partisipasi Aktif Sosial dan Politik Pemuda.

PN III tersebut memiliki pagu mencapai Rp 9.175.693.000 dan realisasi sebesar Rp 7.179.705.330 atau 78% dengan rincian sebagai berikut:

Capaian Output Prioritas Nasional III

Nama Satker	Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output Strategis	Target	Capaian Output Strategis	%
Bidang Pengembangan Pemuda	PP: Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda KP: Kualitas Pemuda RO: 3808.QDC.002 Pemuda Kader yang terfasilitasi dalam Kegiatan Kewirausahaan Pemuda Nasional dan Internasional Berbasis Inovasi dan Teknologi	2.000.000.000	1,105,710,000.00	55.29%	Orang	100,000	660.0000	100%
Bidang Pengembangan Pemuda	PP: Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda KP: Kualitas Pemuda RO: 3808.QEI.001 Sentra Kewirausahaan Pemuda yang terfasilitasi pengembangan kewirausahaan	4.350.000.000	3,826,420,000.00	87.96%	Lembaga	50,000	50	100%
Bidang Pengembangan Pemuda	PP: Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda KP: Kualitas Pemuda RO: 6970.PEA.001 Kementerian/Lembaga/Provinsi yang Bekerjasama dalam Kemitraan Kepemudaan	2,825,693,000.00	2,247,575,330.00	79.54%	Kegiatan	12,000	12,0000	100%

3. Prioritas Nasional IV : Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Pelaksanaan PN IV diantaranya melalui :

- A. 1 Program Prioritas/PP yakni Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter;
- B. 1 Kegiatan Prioritas/KP yakni Revolusi Mental dalam Sistem Pendidikan untuk Memperkuat Nilai Integritas, Etos Kerja, Gotong Royong, dan Budi Pekerti;
- C. 1 Proyek Prioritas/ProP yakni Peningkatan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda, serta Pengembangan Pendidikan Kepramukaan.

PN IV tersebar pada 2 Satker dengan pagu di Deputi Bidang Pengembangan Pemuda mencapai Rp35.495.560.000 dan realisasi sebesar Rp33.353.101.162 atau 93,96% dengan rincian sebagai berikut:

Capaian *Output* per Prioritas Nasional

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2022 Tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu:

- 1. **Prioritas Nasional I : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;**
- 2. **Prioritas Nasional III : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;**
- 3. **Prioritas Nasional IV : Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;**
- 4. **Prioritas Nasional VII: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.**

Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dan Target serta Realisasi Pencapaian *Output* dari masing-masing Prioritas Nasional adalah sebagai berikut:

3. PN I Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.

Pelaksanaan PN I diantaranya melalui:

- A. 1 Program Prioritas/PP yakni (1) Penguatan Kewirausahaan, UMKM, dan Koperasi.
- B. 1 Kegiatan Prioritas/KP yakni (1) Peningkatan Penciptaan *Start Up* dan Peluang Usaha.
- C. 1 Proyek Prioritas/ProP yakni (1) Pelatihan Kewirausahaan.

PN I tersebut tersebar pada 3 Satker dengan Pagu di Deputi Bidang Pengembangan Pemuda mencapai Rp15.260.922.000.00 dan realisasi sebesar Rp14.216.328.393 atau 93.16% dengan rincian sebagai berikut:

Capaian *Output* Prioritas Nasional I

Nama Satker	Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output Strategis	Target	Capaian Output Strategis	%
Bidang Pengembangan Pemuda	PP : Penguatan Kewirausahaan, UMKM, dan Koperas KP : Peningkatan	15,260,922,000.00	14,216,328,393.00	93.16%	Orang	13.400,0000	31,691.0000	100%

	Penciptaan Start Up dan Peluang Usaha RO: 3808.QDC.001 Pemuda yang terfasilitasi sebagai kader kewirausahaan							
--	--	--	--	--	--	--	--	--

4. PN III Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

Pelaksanaan PN III diantaranya melalui:

- A. 1 Program Prioritas/PP yakni (1) Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda;
- B. 1 Kegiatan Prioritas/KP yakni (1) Kualitas Pemuda;
- C. 2 Proyek Prioritas/ProP yakni: (1) Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Koordinasi Lintas Sektor Layanan Kepemudaan, (2) Partisipasi Aktif Sosial dan Politik Pemuda.

PN III tersebut memiliki pagu mencapai Rp 9.175.693.000 dan realisasi sebesar Rp 7.179.705.330 atau 78% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 15. Capaian Output Prioritas Nasional III

Nama Satker	Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output Strategis	Target	Capaian Output Strategis	%
Bidang Pengembangan Pemuda	PP: Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda KP: Kualitas Pemuda RO: 3808.QDC.002 Pemuda Kader yang terfasilitasi dalam Kegiatan Kewirausahaan Pemuda Nasional dan Internasional Berbasis Inovasi dan Teknologi	2.000.000.000	1,105,710,000.00	55.29%	Orang	100,0000	660.0000	100%
Bidang Pengembangan Pemuda	PP: Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda KP: Kualitas Pemuda RO: 3808.QEI.001 Sentra Kewirausahaan Pemuda yang terfasilitasi pengembangan kewirausahaan	4.350.000.000	3,826,420,000.00	87.96%	Lembaga	50,0000	50	100%
Bidang Pengembangan Pemuda	PP: Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda KP: Kualitas Pemuda RO: 6970.PEA.001 Kementerian/L	2,825,693,000.00	2,247,575,330.00	79.54%	Kegiatan	12,0000	12,0000	100%

	lembaga/Provisi yang Bekerjasama dalam Kemitraan Kepemudaan							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

5. Prioritas Nasional IV : Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

5. Prioritas Nasional IV : Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Pelaksanaan PN IV diantaranya melalui :

- A. 1 Program Prioritas/PP yakni Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter;
- B. 1 Kegiatan Prioritas/KP yakni Revolusi Mental dalam Sistem Pendidikan untuk Memperkuat Nilai Integritas, Etos Kerja, Gotong Royong, dan Budi Pekerti:
- C. 1 Proyek Prioritas/ProP yakni Peningkatan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda, serta Pengembangan Pendidikan Kepramukaan.

PN IV tersebar pada 2 Satker dengan pagu di Deputi Bidang Pengembangan Pemuda mencapai Rp35.495.560.000 dan realisasi sebesar Rp33.353.101.162 atau 93,96% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 16. Capaian Output Prioritas Nasional IV

Nama Satker	Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output Strategis	Target	Capaian Output Strategis	%
Bidang Pengembangan Pemuda	<p>PP: Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkokuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter</p> <p>KP: Revolusi Mental dalam Sistem Pendidikan untuk Memperkuat Nilai Integritas, Etos Kerja, Gotong Royong, dan Budi Pekerti</p> <p>RO: 6968.QDB.001 Lembaga/Komunitas kepemudaan kader yang terfasilitasi dalam Pengembangan Kepemimpinan Pemuda</p>	6,930,000,000.00	6,136,562,350.00	88.55%	Lembaga	38.0000	38.0000	100%

<p>PP: Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter</p> <p>KP: Revolusi Mental dalam Sistem Pendidikan untuk Memperkuat Nilai Integritas, Etos Kerja, Gotong Royong, dan Budi Pekerti</p> <p>RO: 6968.QDC.001 Pemuda Kader yang terfasilitasi dalam Pengembangan Kepemimpinan Pemuda</p>	13,950,830,000.00	13,476,513,712.00	96.6 %	orang	3,380.000	3,380.0000	100 %
--	-------------------	-------------------	--------	-------	-----------	------------	-------

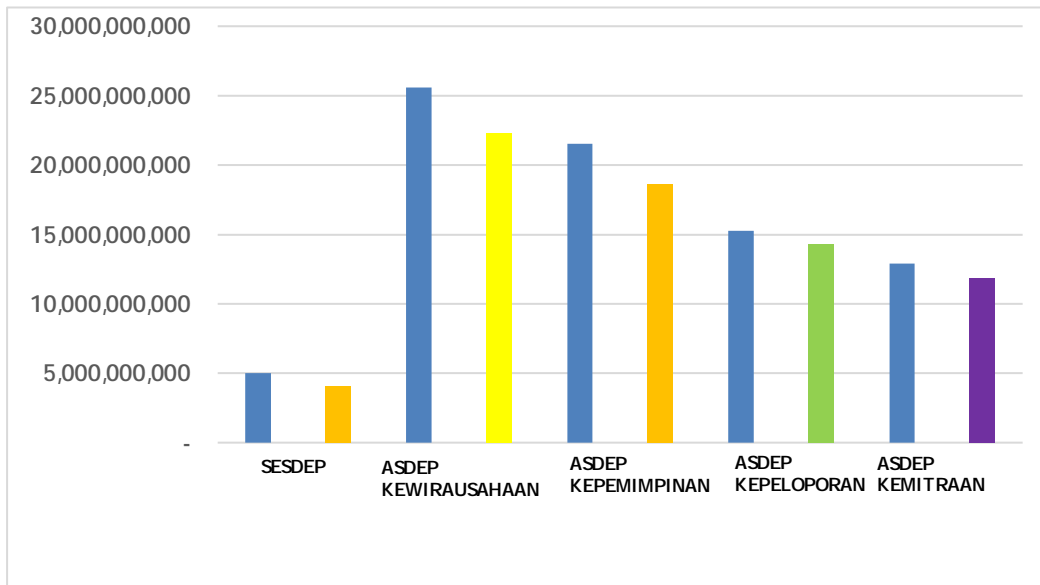
Nama Satker	Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output Strategis	Target	Capaian Output Strategis	%
	<p>PP: Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkokoh Ketahanan Budaya dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter</p> <p>KP: Revolusi Mental dalam Sistem Pendidikan untuk Memperkuat Nilai Integritas, Etos Kerja, Gotong Royong, dan Budi Pekerti</p> <p>RO: 6969.QDB.001 Lembaga/Komunitas kepemudaan kader yang terfasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda</p>	6.338.880.000	6,092,260,000.00	96.11%	Lembaga	50	50	100%

PP: Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter KP: Revolusi Mental dalam Sistem Pendidikan untuk Memperkuat Nilai Integritas, Etos Kerja, Gotong Royong, dan Budi Pekerti RO: 6969.QDC.001 Pemuda Kader yang terfasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	8,275,850,000.00	7,647,765,100.00	92.41%	Orang	1,526,0000	1,526.0000	100%
--	------------------	-------------------------	---------------	-------	------------	-------------------	------

3.5 REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Tahun 2024 mencapai Rp73.328.317.386 atau 91,38% dari anggaran sebesar 80.247.038.000 dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi Anggaran Unit Eselon II



Gambar 3. 9 Realisasi Anggaran Unit Eselon II pada Deputy Bidang Pengembangan Pemuda

Pagu Deputy Bidang Pengembangan Pemuda tahun 2020 s.d 2024 cenderung berfluktuasi secara jumlah pagu dan realisasi yang dicapai.

REALISASI	Tahun 2020	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Deputy Bidang Pengembangan Pemuda	82.800.000.000	81.293.077.429	73.460.259.000	72.299.212.185	113.454.482.000	108.132.507.696	87.247.038.000	85.249.087.673	80.247.038.000	73.328.317.386

Tabel 3. 20 Perhitungan Realisasi Anggaran Periode tahun 2020 -2024

Realisasi anggaran tahun 2024 sebesar 91,38%. Realisasi ini menurun bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan realisasi ini disebabkan oleh pagu anggaran yang belum disesuaikan setelah adanya penghematan Belanja Perjalanan Dinas, ada pun pagu yang bisa digunakan yakni Rp74.202.038.000 dengan penyesuaian persentase penyerapan menjadi sebesar 98,82%

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Deputy Bidang Pengembangan pemuda Tahun 2024 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran program Deputy Bidang Pengembangan Pemuda tahun 2024 dan perkembangan tahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Program (IKP). Secara umum capaian sasaran program Deputy Bidang Pengembangan Pemuda terjadi fluktuasi dari tahun ke tahun karena belum didukung oleh peningkatan tata kelola kelembagaan yang bersih, akuntabel, kapabel dan pelayanan publik yang prima di lingkungan Deputy Bidang Pengembangan Pemuda (Nilai Sistem Akuntabilitas (SAKIP), Nilai Kinerja SMART, Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)). Hal tersebut disebabkan untuk mendukung pencapaian tata kelola kelembagaan membutuhkan komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Deputy Bidang Pengembangan Pemuda. Capaian kinerja Deputy Bidang Pengembangan Pemuda tahun 2024 secara keseluruhan dinyatakan Cukup. **NDUHQD FdsD dsr 8U,8% dari target.**

Upaya Pencapaian target sasaran program telah dilakukan dengan berbagai cara seperti penerbitan kebijakan terkait kebijakan pengembangan pemuda dalam rangka mewujudkan pemuda berkualitas, koordinasi dan sinkronisasi atas pelaksanaan kebijakan tersebut, pengawasan penyelenggaraan pengembangan kepemudaan, peningkatan kemitraan, jejaring kerja, peran serta dan kerja sama dalam pengembangan pemuda sehingga terwujudnya Pemuda yang Berkualitas dan berdaya saing melalui Pengembangan Pemuda untuk terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong.

Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator sasaran tersebut akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi di pusat maupun daerah akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah khususnya kabupaten/kota dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan bertujuan melayani masyarakat.

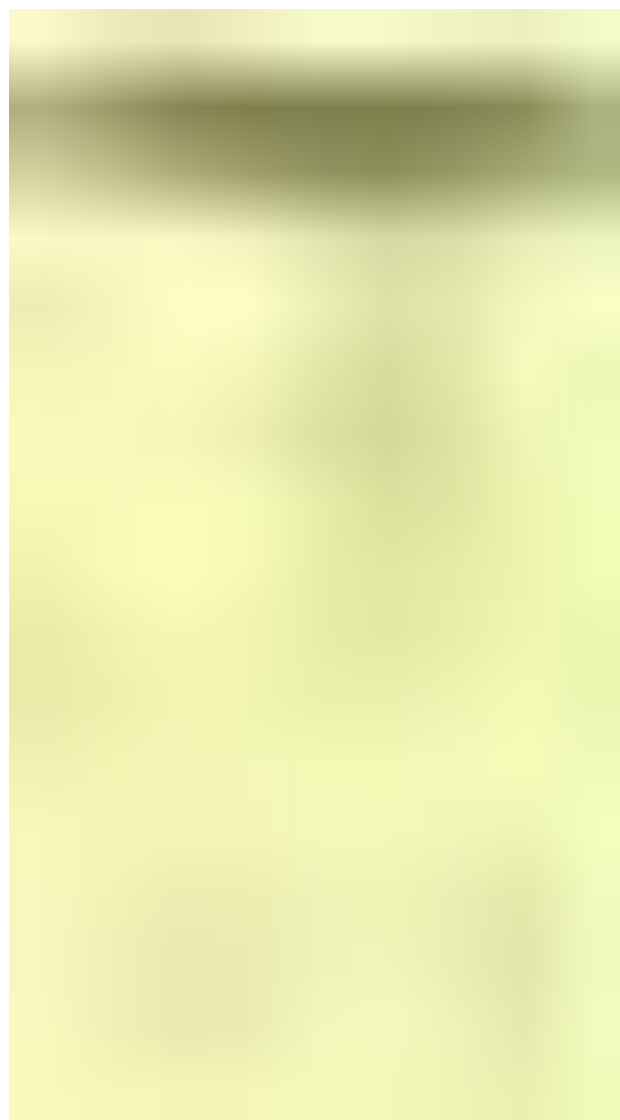


LAMPIRAN
PK DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA



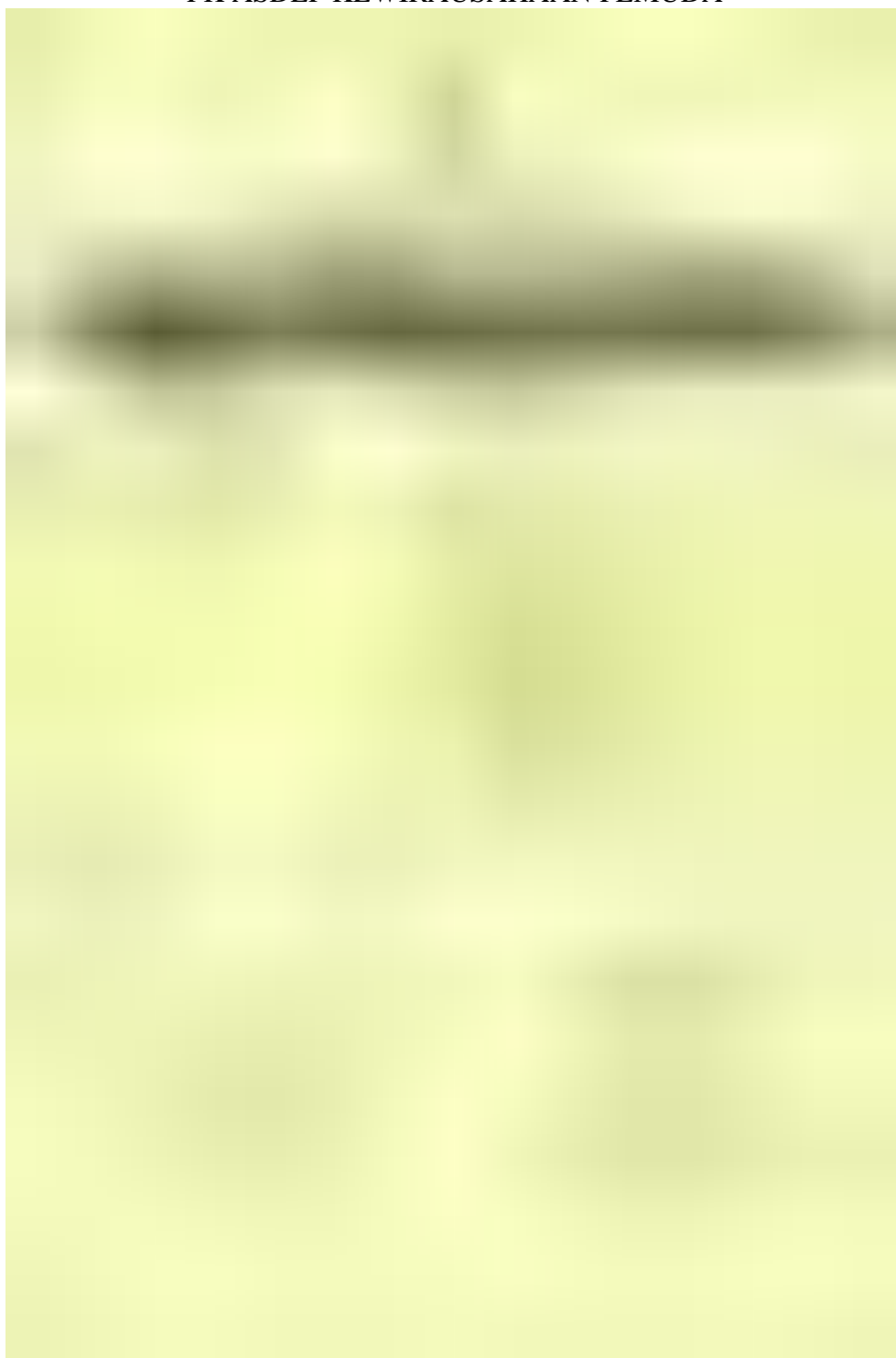


PK SESDEP BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA





PK ASDEP KEWIRAUSAHAAN PEMUDA



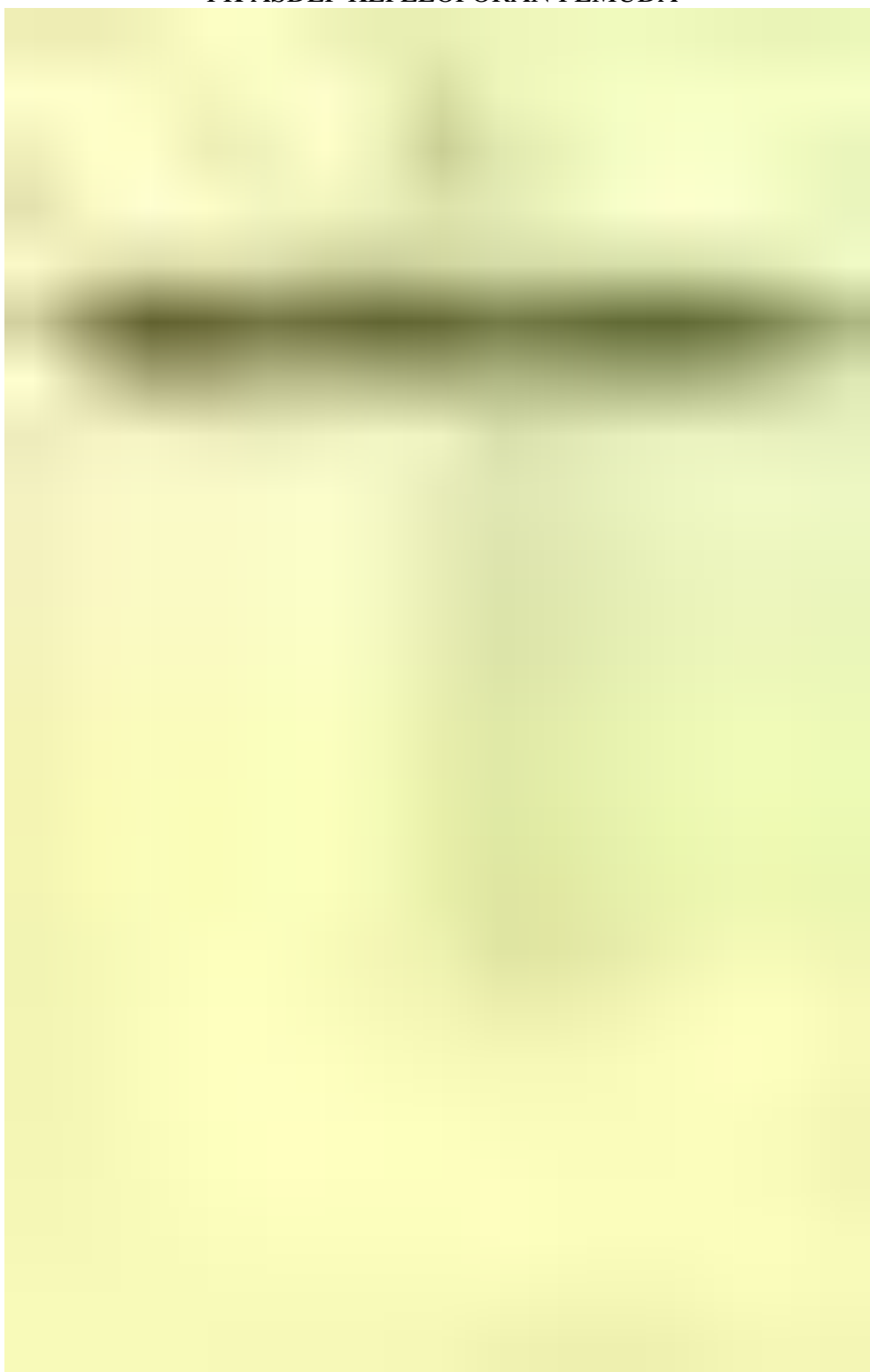


PK ASDEP KEPEMIMPINAN PEMUDA





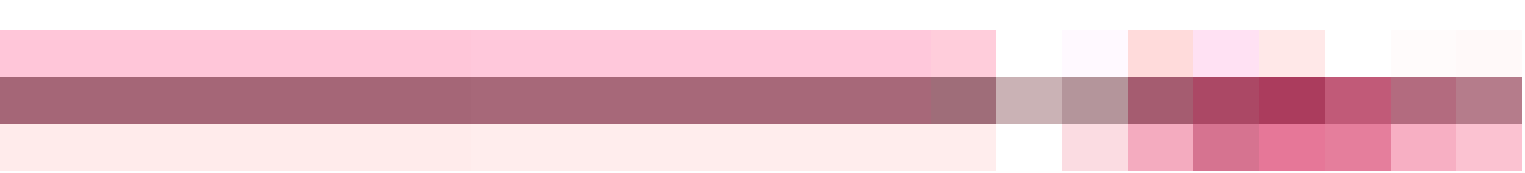
PK ASDEP KEPELOPORAN PEMUDA



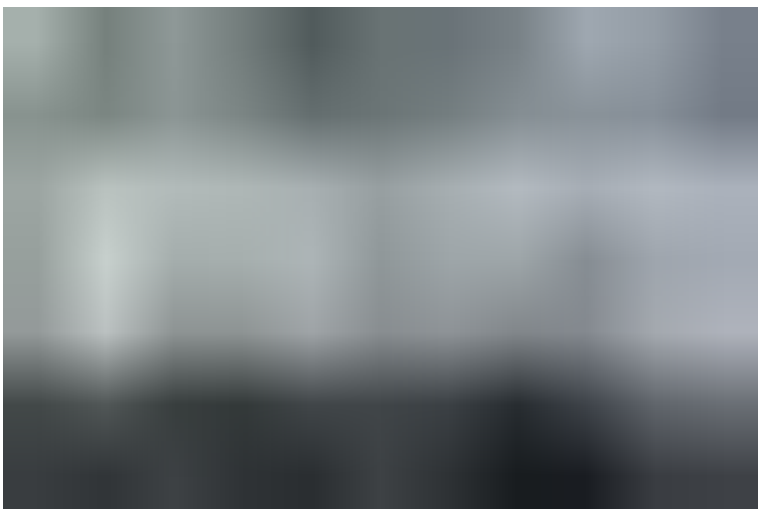
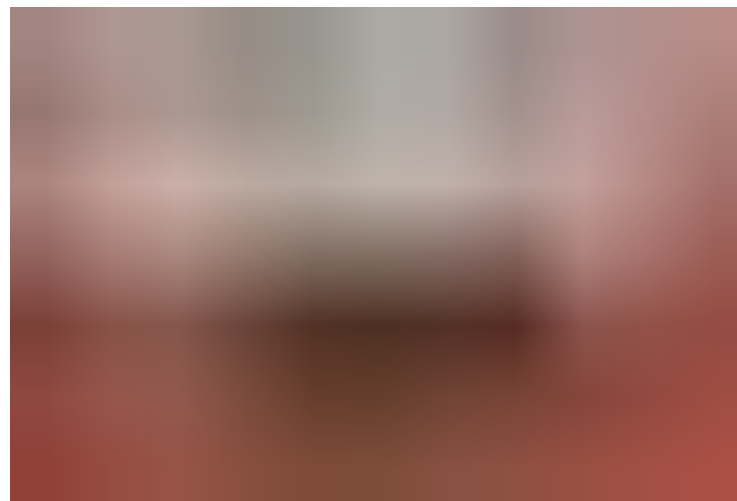
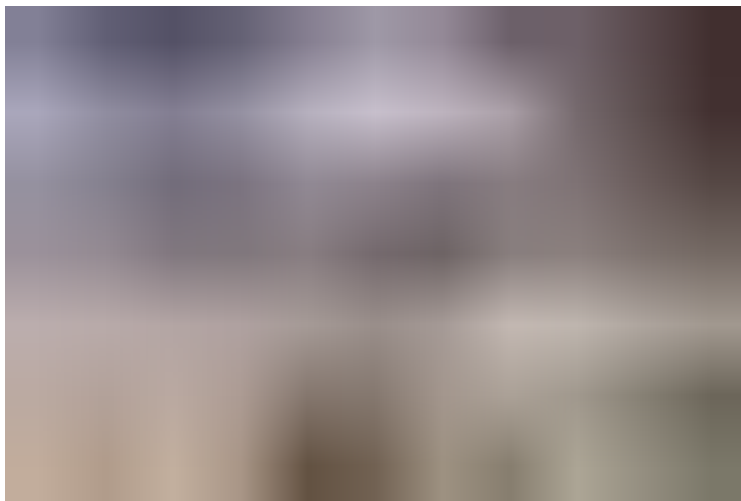
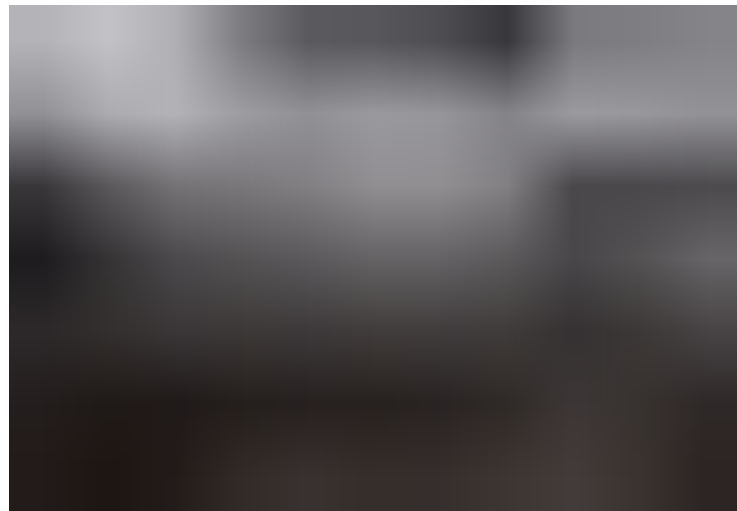
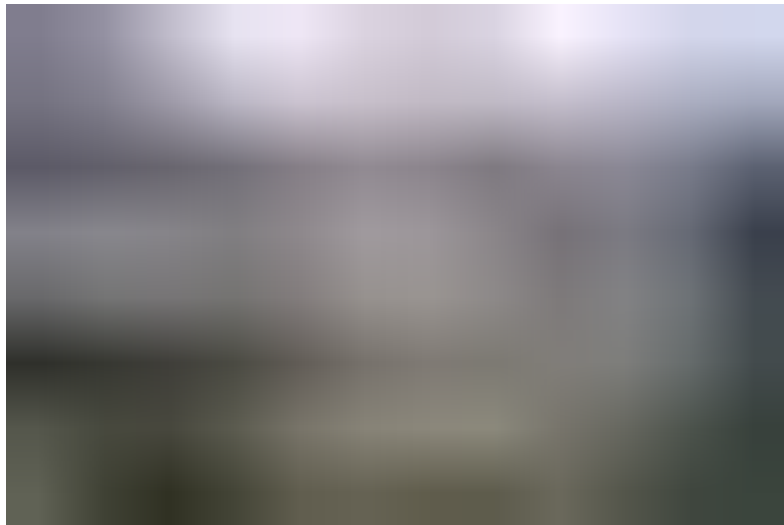


PK ASDEP KEMITRAAN PEMUDA



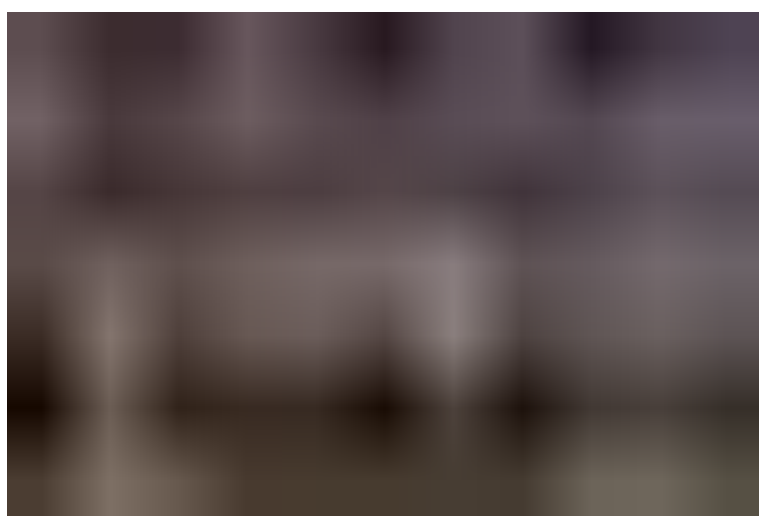
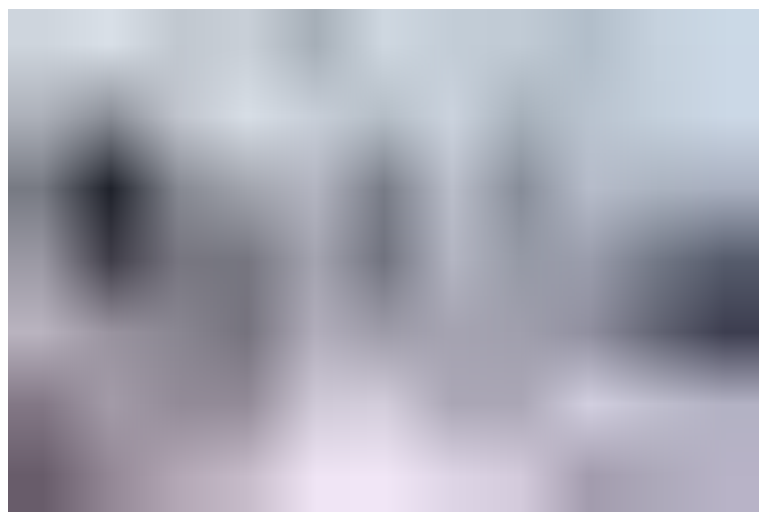
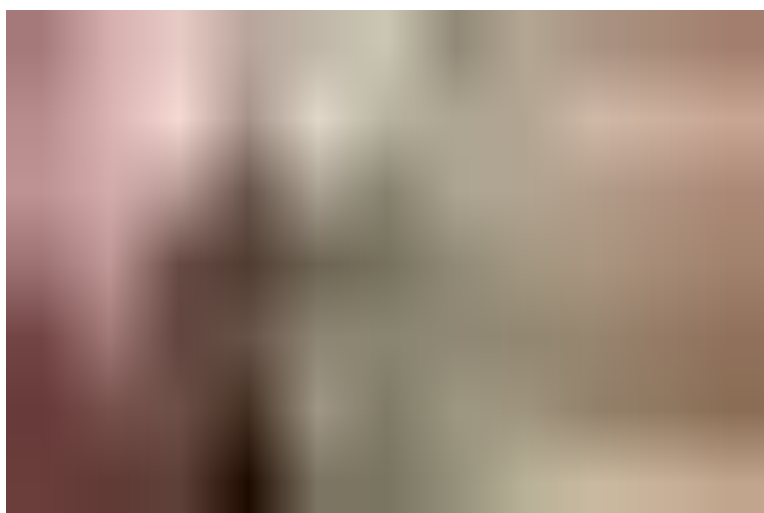
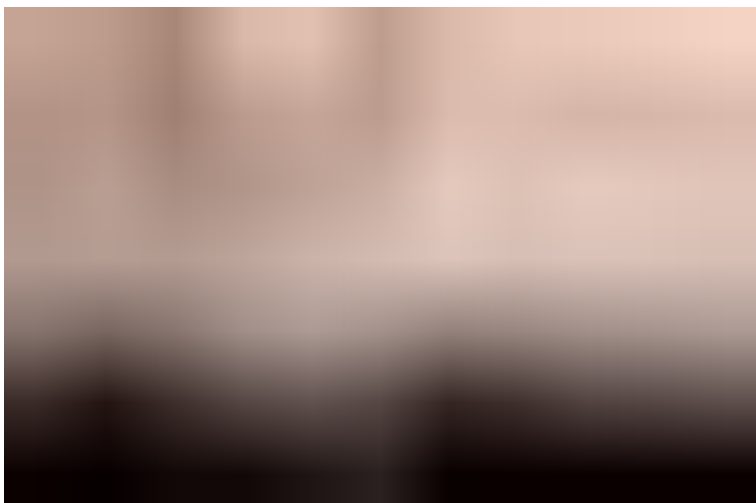
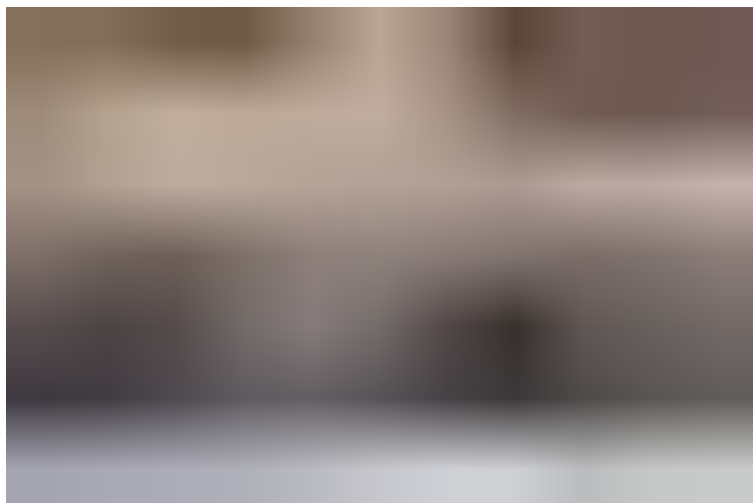


KEGIATAN ASDEP KEWIRAUSAHAAN PEMUDA



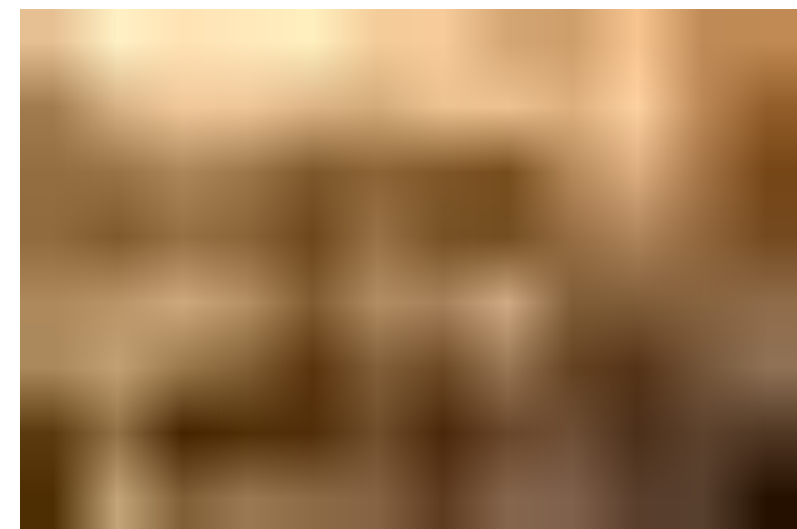
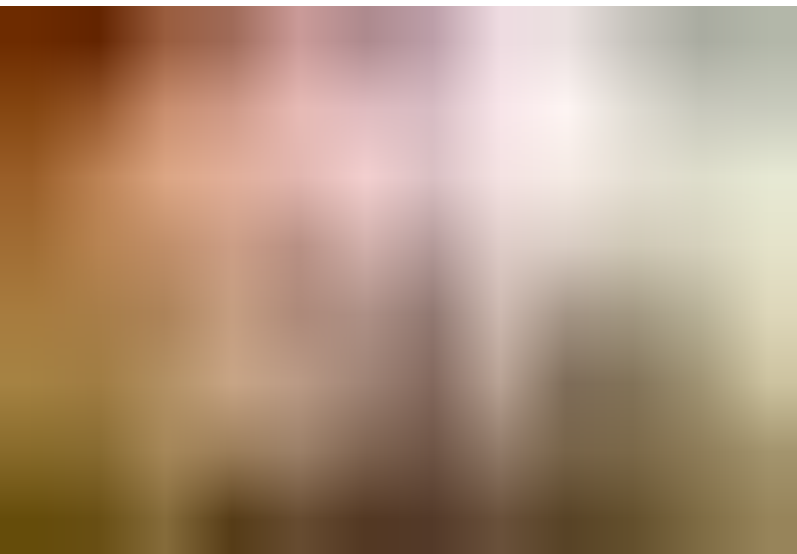


KEGIATAN ASDEP KEPEMIMPINAN



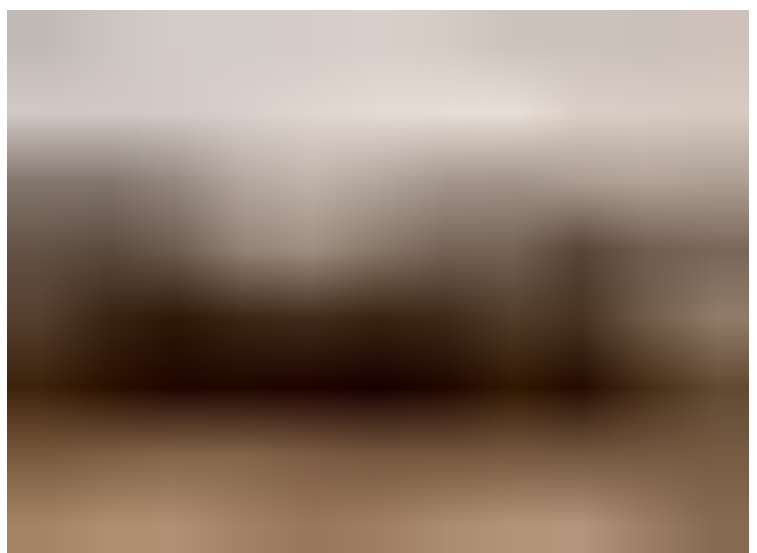
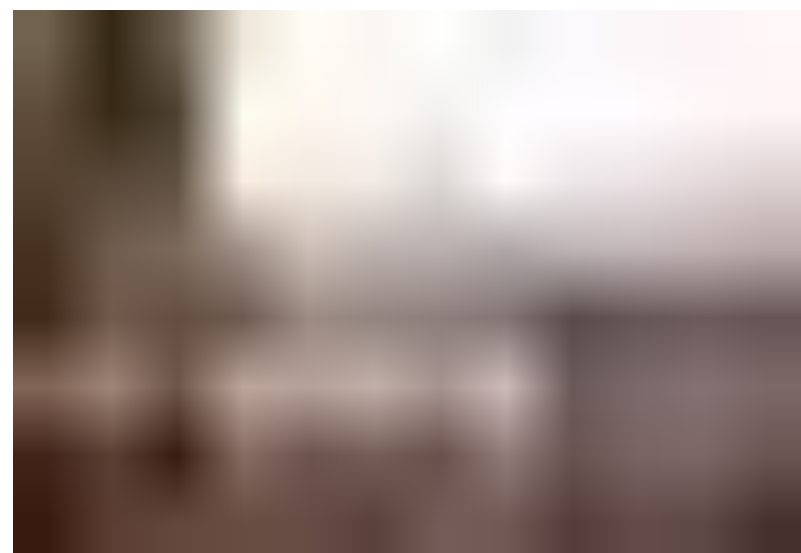
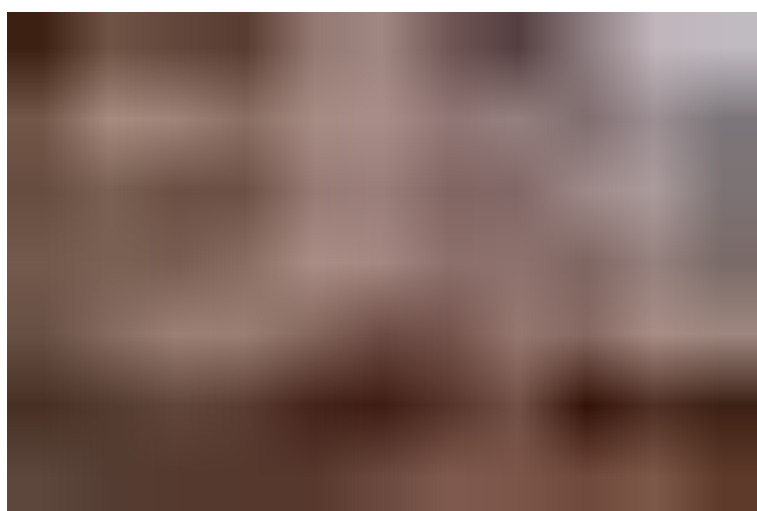
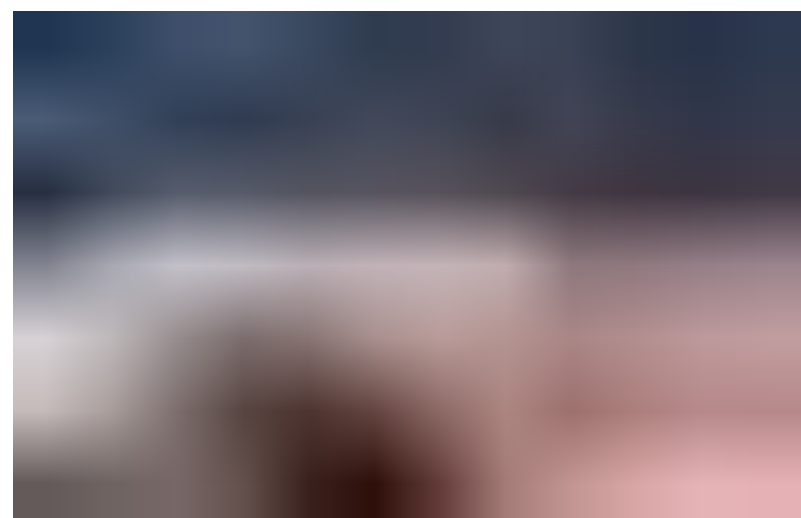
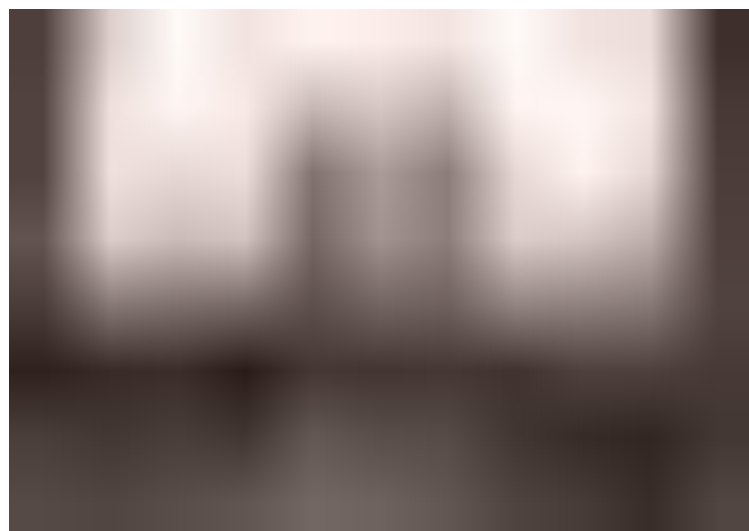


KEGIATAN ASDEP KEPELOPORAN





KEGIATAN ASDEP KEMITRAAN



No	Sasaran Program	Uraian Sasaran Program/ Komponen	Belanja			Capaian Kinerja			
			Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	Tercapainya pemuda yang berkarakter, berbudaya, mandiri, berdaya saing, semangat berwirausaha dan berwawasan luas serta berperan aktif dalam								
	IKU 1.1	Persentase Pemuda yang bekerja dengan status berusaha sendiri dan dibantu buruh (tetap dan tidak tetap)				99.259	0,55%	0,47%	0.85455
	3808.AEA.001	Koordinasi dan Snkronisasi Lintas Instansi Kewirausahaan pemuda	974,950,500	967,728,595					
	3808.AFA.001	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	8,339,000	8,339,000					
	3808.BEA.001	Wirausaha Muda Berprestasi yang Memperoleh Fasilitas Akses Permodalan	618,049,500	615,160,347					
	3808.QDC.001	Pemuda yang Terfasilitasi sebagai Kader Kewirausahaan	7,166,786,000	7,108,164,197					
	3808.QDC.002	Pemuda Kader yang terfasilitasi dalam Kegiatan Kewirausahaan Pemuda Nasional dan Internasional Berbasis Inovasi dan Teknologi	554,405,000	552,855,000					
	3808.QEI.001	Sentra Kewirausahaan Pemuda yang terfasilitasi pengembangan kewirausahaan	1,913,360,000	1,913,210,000					
		Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti kegiatan organisasi dalam 3 bulan terakhir				99.110	7.84%	5.44%	0.69388
	6968.QDB.001	Lembaga/ Komunitas kepemudaan kader yang terfasilitasi dalam Pengembangan	6,771,843,000	6,711,562,350					

6968.QDC.001	Pemuda Kader yang terfasilitasi dalam Pengembangan Kepemimpinan	13,733,303,000	13,476,513,712					
6969.QDB.001	Lembaga/ Komunitas kepemudaan kader yang terfasilitasi dalam Pengembangan	6,092,710,000	6,092,260,000					
6969.QDC.001	Pemuda Kader yang terfasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan	7,668,377,000	7,647,765,100					
Tingkat Kualitas Pelaksanaan Koordinasi Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan					99.935	84%	91.18%	1.08548
6970.PEA.001	Kementerian/ Lembaga/ Provinsi yang Bekerjasama dalam Kemitraan	2,258,399,000	2,256,937,610					
Persentase ketercapaian indikator Rencana Aksi Nasional Pelayanan Kepemudaan					98.794	80%	30.30%	0.37875
6970.QDC.001	Pemuda Kader yang terfasilitasi dalam Kegiatan Kepemudaan Nasional dan Internasional	7,820,482,000	7,726,202,855					
6970.QDC.002	Pemuda Kader yang terfasilitasi dalam Peningkatan Kapasitas, Kemandirian dan Berperan Terhadap Perubahan Global	1,855,845,000	1,855,799,953					
Tingkat Kualitas Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda					99.974	80%	100.00%	1.25
6968.AEA.001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kepemimpinan Pemuda	390,544,000	390,443,250					

6968.AFA.001	Kebijakan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda yang Tersusun	184,860,000	182,630,000					
6969.AFA.001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kepeloporan Pemuda	202,132,000	199,231,860					
6969.AFA.001	Kebijakan Pengembangan Kepeloporan Pemuda yang Tersusun	380,875,000	380,366,900					
	Persentase Usia Muda (15-24 Tahun) yang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan				99.259	22%	23.78%	0.92851
3808.AFA.001	Koordinasi dan Sinkronisasi Lintas Instansi Kewirausahaan pemuda	974,950,500	967,728,595					
3808.AFA.001	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	8,339,000	8,339,000					

	3808.BEA.001	Wirausaha Muda Berprestasi yang Memperoleh Fasilitas Akses Permodalan	618,049,500	615,160,347					
	3808.QDC.001	Pemuda yang Terfasilitasi sebagai Kader Kewirausahaan	7,166,786,000	7,108,164,197					
	3808.QDC.002	Pemuda Kader yang terfasilitasi dalam Kegiatan Kewirausahaan Pemuda Nasional dan Internasional Berbasis Inovasi dan Teknologi	554,405,000	552,855,000					
	3808.QEL.001	Sentra Kewirausahaan Pemuda yang terfasilitasi pengembangan kewirausahaan	1,913,360,000	1,913,210,000					
2	Terwujudnya Deputi Bidang Pengembangan Pemuda yang berkinerja, bersih, akuntabel, profesional, dan melayani								
	IK 2.1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	103,446,000	82,779,500		80.022	0.88	0.7752	0.88091
	1719.EBD.952	Layanan Pekantoran	117,096,000	117,095,700					
	1719.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	103,446,000	82,779,500					
	IK 2.2	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	259,690,000	246,815,516		95.042	0.91	0.7626	0.83802
	1719.EBD.952	Layanan Pekantoran	117,096,000	117,095,700					

	1719.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	259,690,000	246,815,516					
IK 2.3	Indeks kepuasan masyarakat pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda		2,777,217,000	2,580,065,682		92.901	0.92	0.91	0.98446
	1719.EBA.957	Layanan Hukum	89,160,000	69,340,000					
	1719.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	407,075,000	405,931,498					
	1719.EBA.959	Layanan Protokoler	556,748,000	533,407,162					
	1719.EBD.952	Layanan Pekantoran	117,096,000	117,095,700					
	1719.EBA.962	Layanan Umum	980,238,000	839,933,170					
	1719.EBA.994	Layanan Manajemen SDM	626,900,000	614,358,152					
IK 2.4	Nilai PM SAKIP pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda		633,207,000	604,242,405		95.426	0.78	0.7567	0.97013
	1719.EBD.952	Layanan Pekantoran	117,096,000	117,095,700					
	1719.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	516,111,000	487,146,705					
IK 2.5	Persentase penyelesaian temuan LHP BPK pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda		363,136,000	329,595,016		90.764	92%	90.57%	0.98446
	1719.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	103,446,000	82,779,500		80.022			
	1719.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	259,690,000	246,815,516		95.042			